

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL

**BUDAYA AKADEMIK DALAM SEJARAH PENDIDIKAN;
SEBUAH KAJIAN HISTORIS DARI BUKU SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA
KARYA NASUTION (2014), PENDIDIKAN DALAM ALAM INDONESIA
MERDEKA KARYA POERBAKAWATJA (1970), DAN SEJARAH PENDIDIKAN
KARYA BARNADIB (1983).**

OLEH; M. AINUL YAQIN, S.PD, M.ED



**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

LAPORAN PENELITIAN

BUDAYA AKADEMIK DALAM SEJARAH PENDIDIKAN;
SEBUAH KAJIAN HISTORIS DARI BUKU SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA
KARYA NASUTION (2014), PENDIDIKAN DALAM ALAM INDONESIA MERDEKA
KARYA POERBAKAWATJA (1970), DAN SEJARAH PENDIDIKAN KARYA
BARNADIB (1983).

Oleh; M. Ainul Yaqin, M.Ed.

PENDAHULUAN

Budaya akademik sering menjadi bahan perbincangan di kalangan akademisi ketika mereka membicarakan hal-hal yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks yang lebih khusus, diskursus tentang budaya akademik ini biasanya berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, penelitian, manajemen, administrasi, dan penelitian dalam level perguruan tinggi.

Dari sisi definisi, budaya akademik adalah seperangkat sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang mengintegrasikan kelompok akademik tertentu (Maassen, 1996: 158). Berangkat dari pengertian ini, penulis berpendapat bahwa wilayah budaya akademik dapat mencakup kebiasaan, keyakinan, ciri khas, dan nilai-nilai yang dipercaya dan dijalankan oleh sekelompok komunitas akademis. Bentuk-bentuk dari kebiasaan, keyakinan, ciri khas, dan nilai-nilai itu dapat digambarkan dalam berbagai macam kegiatan yang terkait dengan dunia akademik seperti belajar-mengajar, penelitian, administrasi, manajemen, kepemimpinan, keuangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan aktivitas akademik di perguruan tinggi.

Kemudian, dari sisi kemanfaatan, semakin kuat sebuah budaya akademik pada sebuah komunitas, maka itu akan mendorong seluruh anggota komunitas bekerja keras. Kemudian, budaya akademik adalah ideologi akademis sebagai bentuk ikatan emosional atau moral kapital yang menjadi elemen sentral dalam membangun organisasi perguruan tinggi (Calrk, 1980: 25). Dari fungsi ini, dapat dipahami bahwa mengkaji budaya akademik sangatlah penting dalam

usaha untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat akademis.

Selanjutnya, terkait dengan sejarah, banyak definisi tentang sejarah, akan tetapi tidak sedikit pula para ahli sejarah yang menghindari untuk membuat definisi tentang sejarah. Namun, dalam pengantar ini, penulis tertarik untuk mengutip sebuah penjelasan dari dua orang sejarawan terkemuka E.H Carr dan R.W. Davies (1980: 9-10) yang mengomentari sebuah definisi dari Kamus Oxford yang dinilai oleh mereka sebagai sebuah definisi yang tendensius dari orang-orang sekolahan berfikir secara empiris yang dalam memberi kesimpulan memisahkan antara pengalaman dan kesimpulan. Namun begitu, ada penjelasan yang menarik untuk dikutip terkait dengan “definisi tentang sejarah ini. Definisi tersebut adalah “Sejarah terdiri dari kumpulan fakta yang dipastikan. Fakta-fakta tersedia bagi sejarawan dalam dokumen, prasasti, dan sebagainya, seperti ikan di lempengan penjual ikan. Sejarawan mengumpulkannya, membawanya pulang, dan memasak serta menyajikannya dengan gaya apa pun yang menarik baginya” (Carr and Davies, 1980: 9). Dari penjelasan ini, penulis melihat bahwa melihat dan mengkaji sejarah terkait dengan perkembangan budaya akademik adalah penting dan perlu dilakukn dalam bentuk penelitian.

Terkait dengan manfaat sejarah, John Tosh (2015: 49) menjelaskan “Sebagai bank memori dari apa yang asing atau sesuatu yang tidak pernah kita kenal, sejarah merupakan sumber daya budaya kita yang paling penting. Sejarah menawarkan sarana – tidak sempurna tetapi sangat diperlukan – untuk memasuki jenis pengalaman yang sama sekali tidak mungkin dalam kehidupan kita sendiri. Perasaan kita tentang ketinggian yang dapat dicapai manusia, dan kedalaman di mana mereka mungkin tenggelam, sumber daya yang mungkin mereka tunjukkan dalam krisis, kepekaan yang dapat mereka tunjukkan dalam menanggapi kebutuhan satu sama lain - semua ini dipelihara dengan mengetahui apa yang telah telah dipikirkan dan dilakukan dalam konteks yang sangat berbeda di masa lalu”. Dari penjelasan Tosh ini, penulis memahami bahwa mengkaji kejadian-kejadian di masa lalu melalui sejarah adalah sangat penting karena kita tidak pernah dan tidak mungkin untuk mengalami kejadian di masa lalu. Dalam hal ini, terkait dengan perkembangan budaya akademik di masa lalu, mempelajarinya dari sejarah pendidikan di masa yang telah lalu adalah penting untuk dilakukan.

Persoalan-persoalan yang terkait dengan budaya akademik di perguruan tinggi di Indonesia selalu mengemuka ketika muncul infomasi tentang daftar peringkat perguruan-perguruan

tinggi di dunia. Peringkat perguruan tinggi di dunia ini biasanya muncul setiap tahun sekali. Ada beberapa lembaga yang setiap tahun secara kontinu mengeluarkan peringkat perguruan tinggi di dunia antara lain Shanghai Ranking ARWU (The Academic Ranking of World Universities), QS World University Ranking, The World University Ranking Times Higher Education, dan lain-lain. Persoalan selalu muncul ketika ranking-ranking itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, ranking perguruan tinggi-perguruan tinggi top di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, di tahun 2019, peringkat Universitas Indonesia (UI) dalam QS World University Ranking menurun dari ranking 277 ke 292 dari 1000 universitas di 84 negara di dunia. Menurut penjelasan Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf menjelaskan tentang tren menurunnya peringkat perguruan tinggi-perguruan tinggi Indonesia di level dunia. Yusuf mengungkapkan (detikEdu, 5/6/2021) "Tidak seperti universitas-universitas di negeri jiran, beberapa tahun terakhir universitas besar kita meluncur ke bawah terus. Turun terus. Ini bukan stagnasi lagi tapi regresi. Kalau stabil masih okelah tapi ini kan tidak,".

Pada dasarnya, harus diakui, kalau dilihat dari perkembangan kualitas, perguruan tinggi di Indonesia cenderung berada di posisi di bawah negara-negara lain yang tingkat kemajuan ekonomi dan pendidikannya setara atau di atas Indonesia. Persoalan ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Untuk itu, sebuah usaha untuk mencari akar persoalan rendahnya kualitas perguruan tinggi ini perlu dilakukan. Dalam hal ini, ketika berbicara kualitas perguruan tinggi, maka kita perlu mengkaji tentang budaya akademik. Selanjutnya, ketika berbicara budaya akademik, perlu kiranya untuk memahami perkembangan budaya akademik itu melalui sejarah pendidikan, dalam hal ini sejarah pendidikan Indonesia. Karena alasan ini, penulis membuat penelitian yang berjudul "Perkembangan Budaya Akademik Dalam Sejarah Pendidikan; Sebuah Kajian Historis dari Buku Sejarah Pendidikan Nasional". Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan; sejauh mana perkembangan budaya akademik di perguruan tinggi Indonesia dalam sejarah pendidikan Indonesia di dalam buku "Sejarah Pendidikan Indonesia" karya Nasution (2014), "Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka" karya Poerbakawatja (1970), dan "Sejarah Pendidikan" karya Barnadib (1983)?

METODE

Di dalam penelitian ini, dalam memahami apa itu penelitian sejarah, penulis mengacu pada penjelasan Class (1989) bahwa penelitian sejarah adalah sebuah penelitian tentang berbagai macam hubungan antara isu-isu yang mempengaruhi masa lalu, kemudian berlanjut mempengaruhi masa sekarang, dan dengan jelas akan dapat mempengaruhi masa yang akan datang. Selanjutnya, Howard Lune dan Bruce Berg (2017: 159) menjelaskan bahwa asumsi dasar melakukan penelitian sejarah adalah peneliti bisa belajar tentang sesuatu di masa sekarang dari masa lalu. Dari pengertian ini, penulis memahami bahwa penggunaan pendekatan sejarah dalam meneliti perkembangan budaya akademik di era masa lalu di dalam beberapa buku sejarah pendidikan adalah sebuah langkah akademik yang tepat.

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengacu pada pendapat Howard Lune dan Bruce Berg (2017: 161) yang mengatakan sumber-sumber data yang digunakan oleh para peneliti sejarah social tidak berbeda atau paralel dengan sumber-sumber data yang digunakan oleh para ilmuwan social seperti; catatan-catatan rahasia, rekaman-rekaman atau catatan-catatan public, dokumen pemerintah, esai-esai, bahkan dapat menggunakan lagu-lagu, puisi-puisi, catatan harian dan lain-lain. Secara umum, ada tiga klasifikasi sumber data dalam penelitian sejarah, antara lain sumber-sumber utama (primary sources), sumber-sumber kedua (secondary sources), dan sumber-sumber ketiga (tertiary sources) (Lune and Berg, 2017: 161). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber kedua (secondary sources) dan sumber-sumber ketiga (tertiary sources) seperti buku teks, ensiklopedia, abstraks, bibilgiohrafii dan sumber-sumber sejenis.

Dalam mengolah data, penulis menggunakan dua metode yang disarankan oleh Howard Lune dan Bruce Berg (2017: 163-164) dengan menggunakan analisa "external dan internal criticism". External Criticism adalah sebuah proses pencarian untuk untuk menentukan ke autentikan sebuah dokumen dan artifak dengan memberi penekanan apakah sumber-sumber data dan penulisnya adalah benar-benar autentik. Sedangkan Internal Criticism adalah sebuah cara untuk menganalisa keaslian dokumen sejarah.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan di dalam process external criticism ini antara lain 1) meyakinkan tentang siapa yang menulis sumber-sumber itu? 2) seperti apa keautentikan dan keaslian data, ada kepentingan apa dan ada biasa apa dalam sumber-sumber itu? 3) seperti apa

kondisi dan situasi Ketika dokumen itu ditulis atau dibuat. 4) siapa audien yang dituju dalam dokumen itu. 5) sumber-sumber apa yang diistimewakan atau disepelekan dalam narasinya 6) apakah sumber-sumber lain mengacu pada sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian itu 7) bukti-bukti apa yang disajikan dalam sumber-sumber itu. 8) seperti apa konteks sejarah ketika sumber itu dibuat.

Kemudian, Internal criticism mempunyai beberapa Langkah penting antara lain; 1) apa yang sesungguhnya ingin dikatakan oleh penulis. 2) apa motif penulis sehingga dia menulis dan membuat statemen seperti dalam dokumen tersebut. 3) apa referensi yang dipakai oleh penulis itu. 4) apa kesimpulan yang ditawarkan dalam dokumen itu. 5) referensi apa saja yang dipakai dan dimasukkan di dalam karya atau dokumen itu. 6) apakah statemen penulis itu akurat. 7) apakah pendirian dari waktu ke waktu dan dari period eke periode sama atau bertentangan. 8) apa yang ditawarkan dalam dokumen-dokumen itu sebagai bagian dari pembelajaran moral. Singkatnya, dengan metode inilah, penelitian ini dilakukan.

DISKUSI

BUDAYA AKADEMIK INDONESIA KUNO

Dalam studi budaya, Boas menyatakan bahwa pendekatan sejarah penting dalam mempelajari budaya terutama penggunaan bukti-bukti arkeologis yang berfungsi tidak hanya untuk mempelajari kondisi zaman lampau tetapi juga untuk mempelajari bahasa, adat istiadat, dan pemikiran masyarakat (Boas, 1944: 165). Dia menjelaskan solusinya untuk menggunakan pendekatan holistik dan historis dalam mempelajari budaya setelah dia memberikan kritik terhadap pendekatan studi budaya evolusionis (Stocking, 1966: 869). Oleh karena itu, penelitian ini juga membahas tentang sejarah singkat pendidikan Indonesia pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya. Pendekatan studi sejarah ini merupakan strategi utama untuk memahami perkembangan budaya akademik Pendidikan tinggi di Indonesia.

Mengacu pada gagasan bahwa pengaruh budaya perlu dipelajari dan diteliti secara serius di berbagai tingkatan dari halaman gedung taman kanak-kanak hingga dalam sebuah pertemuan manajemen senior (Van Oord, 2005: 173). Dalam mempelajari kondisi dan sejarah budaya akademik pendidikan tinggi Indonesia, kita tidak bisa melihatnya hanya dari sejarah pendidikan tinggi saja, tetapi harus dipelajari secara komprehensif, dari sejarah semua jenjang pendidikan. Dalam mempelajari perkembangan Pendidikan secara historis, kita harus menemukan jalur-jalur penting yang menunjukkan kepada kita bagaimana nenek moyang kita mendidik masyarakat mereka. Tidak akan ada artinya jika perkembangan pendidikan hanya bercerita tentang kehidupan para sarjana pendidikan. Perkembangan pendidikan dan pengajaran seharusnya memberikan kita pengetahuan tentang perkembangannya (Barnadib, 1983:9).

Sejarah sistem pendidikan di Indonesia sangat singkat dan sumbernya sangat terbatas, oleh karena itu, meskipun fokus pembahasan ini adalah sejarah budaya akademik di pendidikan tinggi; kita harus menyertakan informasi tentang kondisi dan perkembangan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini penting karena setiap jenjang pendidikan berada dalam satu sistem pendidikan di mana dalam pelaksanaan programnya, semua jenjang pendidikan saling terkait satu sama lain (Cummings, 1981: 35).

Dari Kutai hingga Sriwijaya

Sejarah pendidikan Indonesia dimulai dari era perkembangan salah satu agama dunia di Indonesia. Keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu di pulau Jawa, Bali, dan Sumatra pada abad ke-4 telah menjadi wadah pendidikan bagi masyarakat Nusantara dan Manca Negara di daerah-daerah tersebut (Peorbakawatja, 1970: 13). Secara umum, Indonesia, atau lebih tepatnya waktu itu disebut Nusantara, telah menerima agama, pengetahuan, dan budaya dari tetangganya, India (Barnadib, 1983: 10). Dari prasasti batu yang menggunakan huruf-huruf Pallawa sebagai bagian dari bahasa Sansekerta, pada zaman raja Mulawarman yang memerintah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur pada abad ke-3-4, menunjukkan kepada kita adanya pendidikan yang dipengaruhi oleh India.

Tujuan pendidikan di era Mulawarman ini adalah untuk menginformasikan tugas dan kewajiban kasta-kasta yang ada dan menjadi alat yang menghubungkan Tuhan dan manusia. Tujuan Pendidikan waktu itu sederhana karena kebutuhan hidup masih sangat sederhana. Untuk hidup, manusia era itu tidak membutuhkan keterampilan menulis dan membaca. Setelah itu, Raja Purnawarman yang memimpin kerajaan Tarumanegara di Bogor, Jawa Barat pada abad ke-5, telah menunjukkan pada prasasti batu yang dipahat dengan huruf-huruf Pallawa. Dijelaskan adanya pendidikan di mana orang-orang pada zaman itu telah belajar menulis dan membaca bahkan tidak ada informasi bagaimana mereka belajar dan siapa gurunya (1983:11).

Selanjutnya pada abad ke-6, Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera telah berkembang menjadi pusat perkembangan agama Buda dan pendidikan. Letaknya yang berada di tengah jalan antara Cina dan India, telah membuat kerajaan Sriwijaya berkembang dengan baik sebagai negara perdagangan yang besar. Dalam mengembangkan dan membangun perdagangan dengan negara lain, Sriwijaya banyak menggunakan kapal, karyawan, dan pekerja. Karena itu, Sriwijaya mengembangkan pendidikan untuk mendidik para karyawan dan pekerjanya agar mampu untuk mengoperasikan kapal dan terampil dalam berbisnis dengan orang lain baik di wilayah Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan lain di wilayah Nusantara maupun Manca Negara. Setelah itu, Sriwijaya berangsur-angsur menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan dengan mendirikan pusat pendidikan yang disebut Dubu, kota tempat belajar masyarakat (1983:11-12).

Selanjutnya, di era Raja Balaputra, Kerajaan Sriwijaya mengirim banyak mahasiswa yang umumnya adalah para pendeta Buda yang masih muda untuk belajar di India. Kerajaan berharap ketika mahasiswa ini menamatkan pendidikannya dan kemudian pulang ke Sriwijaya, mereka dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuannya di tanah kelahiran mereka. Bahkan, untuk mendukung kelancaran para mahasiswa yang belajar di India, kerajaan Sriwijaya membangun asrama mahasiswa Sumatera yang belajar di Universitas Nalanda, sebuah wilayah dekat Calcutta, India pada tahun 850. Universitas Nalanda ini memiliki mahasiswa dari Cina, Jepang, Sriwijaya, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Setelah itu, di era Raja Balaputra ini, kerajaan Sriwijaya mempunyai program kamus Bahasa Sansekerta. Raja Balaputra meminta para biksu Buda dan mahasiswa untuk membuat kamus bahasa daerah dan bahasa Sansekerta. Saat itu, pendidikan di Sriwijaya difokuskan pada studi-studi agama dan politik perdagangan. Fokus Pendidikan ini mengikuti program pengembangan pendidikan berbasis agama dan perdagangan sesuai dengan program Raja Balaputra. Fokus pengembangan Pendidikan di era Raja Balaputra ini membawa dampak positif bagi perkembangan kerajaan khususnya perkembangan studi agama Buda dan perkembangan perdagangan di Sriwijaya. Sriwijaya kemudian menjadi negara yang kuat dan berpengaruh di semenanjung Malaka dan sekitarnya. Karena pengaruhnya ini, Sriwijaya mampu menjadi penghubung antara kekuatan budaya dan perdagangan antara Barat dan Timur (1983: 12).

Di era ini, penulis melihat bahwa Raja Balaputra mampu membuat dua kebijakan strategis yaitu kebijakan mengembangkan pendidikan dan politik perdagangan. Dari sisi kebijakan pendidikan, kebijakan mengirim para pendeta Buda dan mahasiswa untuk belajar di salah satu universitas terkenal di India waktu itu memberi beberapa dampak antara lain; 1) Para pendeta Buda dapat memperkaya ilmu pengetahuannya yang kemudian mentransfernya kepada para muridnya di Sriwijaya. Langkah ini jelas dapat semakin memajukan kualitas pendidikan agama dan politik perdagangan sebagaimana yang diinginkan oleh Raja balaputra. 2) Para pendeta Buda dan mahasiswa yang telah pulang dapat memajukan dan meningkatkan kualitas universitas di Sriwijaya. Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan, maka itu akan menari para mahasiswa dari manca negara untuk belajar di Sriwijaya.

Kemudian, dari sisi kebijakan politik perdagangan, ada dua hal menguntungkan 1). Kebijakan mengembangkan pendidikan agama dengan cara mengirim mahasiswa ke pusat studi agama Buda di Kalkuta, India dan membangun asrama mahasiswa Sriwijaya dapat membangun

pemahaman pada masyarakat luar negeri bahwa Sriwijaya adalah negara maju dan makmur yang mampu mengirim mahasiswa-mahasiswanya ke India. Secara politis, ketika banyak orang memahami bahwa Sriwijaya adalah kerajaan maju dan makmur, maka akan ada banyak orang asing penasaran dan datang ke Sriwijaya. 2) Pengembangan ilmu agama Buda adalah menjadi kajian utama di universitas di Sriwijaya waktu itu. Ini juga menjadi peneguh dan pengakuan dari bangsa-bangsa di mancanegara waktu itu, khususnya dari bangsa-bangsa wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara yang umumnya menganut agama Buda. 3) Selain mengembangkan ilmu agama, raja Balaputra juga membuka kajian politik perdagangan. Kajian ini jelas bermanfaat bagi kerajaan karena akan ada banyak sumberdaya yang mampu mengelola perdagangan di wilayah kerajaan. Ini terbukti dengan majunya Malaka sebagai pusat perdagangan di bawah kekuasaan Sriwijaya waktu itu. Selain itu, dengan kemampuan dan ketrampilan politik perdagangan yang kuat dari para administrator kerajaan, Sriwijaya mampu menjadi penghubung antara berbagai suku bangsa di Asia dan Asia Tenggara.

Dari Mataram Kuno hingga Majapahit

Relief-relief di Candi Borobudur di Magelang dekat kota Jogjakarta telah menjadi bukti nyata tentang kondisi pendidikan pada zaman Mataram Kuno pada abad ke-8. Relief-relief tersebut menggambarkan sekolah dengan siswa dan guru sebagai situasi di sekolah saat ini (Poerbakawatja, 1970: 20; Barnadib, 1983: 20). Gambar tersebut menunjukkan seorang Brahmana (pendeta Buda) menjadi guru yang dikelilingi murid-muridnya di beranda yang luas (Barnadib, 1983: 20). Guru memikirkan nilai-nilai Buda (Poerbakawatja, 1970: 20) dan siswa belajar membaca dan menulis dengan menggunakan (Barnadib, 1983: 20). Selain gambaran di Candi Borobudur, kita dapat menemukan bukti lain dari candi Prambanan yang juga berada di dekat Jogjakarta yang di dalamnya terdapat relief-relief yang menceritakan kisah Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana (1983:20).

Di sisi ini, penulis melihat perkembangan budaya akademik di era Mataram Kuno sudah maju, khususnya dari sisi perkembangan Ilmu agama Buda dan Hindu. Adanya dua bangunan candi yang monumental, Borobudur dan Prambanan, telah menjadi tanda bahwa perkembangan ilmu keagamaan di era Mataram Kuno. Hal ini juga menandakan adanya nilai-nilai toleransi keagamaan yang kuat di era itu karena Borobudur adalah candi Buda dan Prambanan adalah candi Hindu. Perlu dipahami bahwa tumbuhnya nilai-nilai toleransi yang kuat dapat disebabkan

oleh beberapa factor seperti pendidikan; kajian keagamaan yang maju dan masyarakat yang terdidik dan factor kebijakan dari kerajaan. Factor kebijakan kerajaan ini juga erat kaitannya dengan pengaruh pendidikan keagamaan yang mampu mempengaruhi cara pandang para pengambil kebijakannya yaitu raja dan para pembantunya. Kemudian, dibangunnya dua candi besar dengan struktur dan struktur bangunan yang kuat dan estetik menandakan bahwa ada budaya akademik kuat di era mataram Kuno ini.

Kemudian, pada era Kediri dan Majapahit, raja Majapahit yang terkenal, Hayam Wuruk memiliki perhatian besar terhadap kegiatan belajar mengajar bagi Brahman (Pendeta Buda) di vihara. Pada masa itu, candi dan vihara telah menjadi pusat kegiatan pendidikan dan peradaban serta memiliki perpustakaan yang diberi nama “Sana Pustaka” (Barnadib, 1983: 20). Dalam sebuah puisi yang ditulis oleh seorang penyair terkenal, Mpu Prapanca, menjelaskan bahwa pengetahuan ada di tangan para bhikkhu dan pertapa yang saleh. Seorang guru agung, Pada-Paduka, adalah seorang pertapa agung yang merupakan seorang suci yang tidak bersalah, memiliki perhatian yang besar terhadap moralitas, dan seorang Buddhis yang setia, murid-muridnya banyak, dan dia telah membuktikan bahwa dia adalah seorang sarjana yang hebat. Dia adalah seorang penyair tanpa kesalahan, mengerti cerita-cerita agama lama; pemahamannya tentang skeptisisme dan filosofi lainnya sempurna dan memiliki keterampilan yang baik dalam mengatur komposisi puisi (Poerbakawatja, 1970: 21). Secara umum, materi belajar mengajar yang diajarkan oleh para Brahmana atau Pendeta Buda pada zaman itu adalah tentang agama Buda dan Brahma, Sastra Mahabharata, dan Ramayana, Etika dan Filsafat, Seni membangun, melukis, dan memahat, ketuhanan, negara, dan teknik sipil candi. Artinya pendidikan pada saat itu secara struktural terpelihara dengan baik dan terfokus pada budi pekerti dan moralitas (Barnadib, 1983: 21).

Penulis melihat di era ini ada perkembangan budaya akademik yang tidak jauh berbeda dengan di era-era sebelumnya, era Mataram Kuno. Di beberapa wilayah di Jawa Timur banyak ditemukan bangunan-bangunan peninggalan sejarah kerajaan Singhasari, Kadiri, Majapahit dan lain-lain. Bangunan-bangunan itu ada yang berupa candi-candi, prasasti, pemandian atau kolam renang para raja, dan tempat-tempat pemujaan agama Hindu dan Buda. Bangunan-bangunan sejarah itu mempunyai karakter kuat sebagai bangunan yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang artistic sesuai dengan eranya. Beberapa bangunan itu ada yang di bangun di era kerajaan Singhasari dan Majapahit.

Ada beberapa prasasti yang menjadi peninggalan kerajaan Majapahit antara lain; Prasasti Wurare (1211 Saka atau 1289 Masehi), 2) Prasasti Sukamerta (tahun 1208 Saka atau 1296 M), 3) Prasasti Kudadu (tahun 1208 Saka atau 1296 M), 4) Prasasti Balawi (tahun 1305 M), 5) Prasasti Prapancasapura (tahun 1320 M), 6) Prasasti Parung (tahun 1350 M), 7) Prasasti Canggal (1358), 8) Prasasti Biluluk (tahun 1366, 1393, dan 1395), 9) Prasasti Karang Bogem (tahun 1387 M), 10) Prasasti Katiden (tahun 1392 M).

Kemudian, candi-candi yang dibangun di era Majapahit antara lain 1) Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah (tahun 1437 Masehi), 2) Candi Cetho di Karanganyar, Jawa Tengah (abad 15 Masehi), 3) Candi Pari di Porong, Sidoarjo Jawa Timur (tahun 1350-1389), 4) Candi Jabung, Paiton, Probolinggo Jawa Timur (1359), 5) Candi Brahu, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, 6) Candi Tikus, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

Sebelumnya, telah ditemukan juga beberapa prasasti dari era kerajaan Singhasari. Prasasti-prasasti itu antara lain; 1) Prasasti Wurare (1289, Masehi) dan 2) Prasasti Singhasari (tahun 1351 Masehi). Selain Prasasti, kerajaan Singhasari juga meninggalkan beberapa candi antara lain 1) Candi Kidal Candi Kidal, 2) Candi Singasari, 3) Candi Jago, 4) Candi Katang Lumbang (1248 Masehi), 5) Candi Kangenan (Tempat peristirahatan terakhir Ken arok), 6) Candi Sumberawan, 7) Candi Jawi (tempat Ibadah Siwa-Buda).

Prasasti-prasasti yang ada di era Singhasari maupun Majapahit ini ditulis dalam beberapa macam huruf. Ada yang ditulis dengan huruf-huruf Sangsekerta dan Jawa. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa di era Majapahit ini ada budaya tulis menulis. Budaya tulis menulis ini, meskipun tidak dilakukan oleh semua golongan masyarakat waktu itu, telah menunjukkan adanya budaya intelektual. Selain itu, adanya berbagai macam candi dengan ciri khas arsitekturnya masing-masing, telah menunjukkan bahwa, budaya intelektual itu juga telah menyentuh pada bangunan-bangunan bersejarah itu. Selain itu, candi-candi yang didirikan di era Singhasari maupun Majapahit juga menunjukkan kerukunan ummat beragama waktu itu antara pemeluk agama Siwa-Buda dan Hindu. Kerukunan umat beragama umumnya mempunyai hubungan dengan adanya pemahaman keagamaan yang toleran. Pemahaman keagamaan yang toleran umumnya dibangun melalui wilayah-wilayah pendidikan. Inilah tanda bahwa budaya akademik, dapat dipahami sebagai budaya belajar, telah memperlihatkan dampaknya melalui karya-karya prasasti dan candi-candi.

Islam dan Pesantren

Setelah itu, antara abad ke-13 dan ke-16, Islam telah merambah ke pulau Jawa dan pulau-pulau lain yang menyebabkan pemeluk agama Hindu dan Buda masuk Islam (Barnadib, 1983: 21). Pada abad-abad ini, telah ada asrama-asrama Islam di mana para siswa Muslim mempelajari Islam. Ada dua model pembelajaran Islam, yaitu pembelajaran yang diberikan di musholla atau langgar (tempat ibadah kecil umat Islam untuk sholat sebagai masjid kecil) dan di pesantren. Pesantren (pondok, surau, dayah, dan nama lain tergantung daerah tempatnya) bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan Islam (Bruinessen, 1995, 17). Belajar mengajar di musholla adalah tempat untuk mempelajari ajaran dasar Islam dan pesantren adalah tempat bagi siswa yang akan belajar Islam dan ketuhanan yang lebih maju (1983: 22). Pesantren atau pondok pesantren di Sumatera dan Jawa saat ini memiliki ciri yang identik dengan lembaga pendidikan Hindu di kuil-kuil di India. Mereka hampir tidak memiliki karakteristik yang sama dengan sistem pendidikan Arab. Ciri-ciri mereka adalah fokus yang kuat pada ajaran agama, penghormatan yang kuat kepada guru, guru tidak memiliki gaji, dan siswa yang meminta sumbangan untuk sekolah mereka (Poerbakawatja, 1970: 19). Model pendidikan ini mengacu pada model pendidikan Indonesia kuno di mana guru dan siswa tinggal bersama dan melakukan kegiatan belajar mengajar di asrama. Guru atau Brahman tidak dibayar, tetapi mereka mendapat kehormatan besar dari masyarakat dan murid-muridnya. Karakteristik yang sama dari pendidikan Indonesia lama kemudian telah diakomodasi oleh Pesantren di mana guru Islam atau kyai mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan murid-muridnya (Barnadib, 1983: 23-24). Selama ini kyai sebagai pimpinan pesantren tidak digaji dan santri juga tidak dipungut biaya. Semua biaya pesantren ditanggung oleh orang-orang yang baik dari kewajiban membayar zakat (C. Geertz, 2014: 256). Zakat adalah kewajiban semua Muslim kelas menengah atas untuk menyumbangkan 2,5% kekayaan mereka.

Di sisi lain, dua ahli Islam di Indonesia, Zamakhsyari Dhofier dan Martin Van Bruinessen, percaya bahwa pemahaman kita tentang silsilah pesantren sangat dipengaruhi oleh bukti-bukti sejarah di masa lalu (Dhofier, 1994: 34; Bruinessen, 1995: 25). Dengan mengutip pemikiran Pigeaud (1967), de Graaf (1974) dan Jayadiningrat (1913) yang percaya bahwa pesantren berasal dari lembaga-lembaga seperti di era pra-Islam seperti mandala dan asyrama, Bruinessen menganggap bahwa pesantren adalah model baru lembaga pendidikan di Indonesia, karena ia tidak yakin ada kegiatan belajar mengajar tekstual sebelum Islam datang (Bruinessen, 1995: 23). Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pemikiran Dhofier dan Bruinessen berbeda dengan

Barnadib dan Poerbakawatja yang meyakini bahwa pesantren memiliki karakteristik yang sama dengan lembaga pendidikan pra-Islam.

Pesantren pada mulanya merupakan kelompok keagamaan umat yang melaksanakan shalat berjamaah yang dipimpin oleh kyai atau imam yang disebut tarekat yang secara rutin melaksanakan shalat-shalat tertentu dalam beberapa hari. Ketika pengikut tarekat harus tinggal di pesantren atau melakukan suluk, kyai menyiapkan beberapa kamar sederhana bagi mereka untuk tinggal di pesantren selama beberapa hari (Dhofier, 1994: 34). Pesantren, dalam beberapa hal, telah menjadi inti dari struktur sosial Islam di desa-desa dan puncak budaya konservatif (Geertz, 2014: 260). Selanjutnya santri di pesantren belajar Islam dengan menggunakan 2 model. Pertama, pengajaran individu yang disebut sorogan di mana kyai atau imam mengajar satu per satu 3 sampai 4 muridnya. Untuk menjaga kualitas pengajarannya, dia tidak ingin mengajar lebih banyak siswa. Kedua, pengajaran kelompok yang disebut bandongan di mana 5-500 siswa mendengarkan seorang kyai yang membaca, menerjemahkan, menjelaskan dan mengulas buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab. Para santri hanya membaca dan membuat beberapa catatan ketika kyai membacakan buku yang sama dengan keras (Dhofier, 1994: 24). Para santri di pesantren pada mulanya belajar membaca Al-Qur'an, kemudian setelah menyelesaikan beberapa buku Islam dasar, mereka mengembangkan bahasa Arab mereka sebagai alat untuk mempelajari lebih lanjut beberapa buku bahasa Arab seperti fikih (Hukum Islam), ushul fiqh (Pengetahuan tentang sumber dan fikih Islam), hadits (ajaran nabi Muhammad), adab (sastra Arab), tafsir tauhid (teologi Islam), tarikh (sejarah Islam), tasawwuf dan akhlaq (etika Islam) (1994: 20).

Pada umumnya, sistem pendidikan di pesantren-pesantren lama tidak memiliki jenjang pendidikan dalam hal kelas (Geertz, 2014: 256), tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa pesantren menerapkan model kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan system kelas (Dhofier, 1994: 20) dengan beberapa jenjang seperti ibtidaiyah (dasar), tsanawiyah (sekolah menengah pertama), aliyah (sekolah menengah atas) dan juga ma'had aly (perguruan tinggi) seperti pada sekolah modern saat ini.

Pesantren telah melahirkan ulama-ulama Indonesia yang berkualitas tinggi dalam ilmu keislaman karena menjaga kualitas metode dan sistem belajar mengajarnya. Tujuan utama pesantren tidak hanya untuk memperkaya pemikiran santri tetapi juga untuk memperkuat moralitas, menghargai kemanusiaan, mempelajari sikap jujur, dan mempersiapkan santri untuk

hidup sederhana, dan menempatkan etika agama di atas etika lainnya. Di pesantren, santri harus memiliki prinsip bahwa belajar di pesantren bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang atau untuk mendapatkan materi duniawi, tetapi untuk melakukan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan (1994: 20-21). Pada awal abad ke-20, beberapa lulusan pesantren melanjutkan studi ke beberapa negara Timur Tengah terutama di Mesir untuk belajar di universitas Al-Azhar. Ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka kebanyakan menjadi motor perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Inggris (Keontjaraningrat, 1994; 81).

Penulis melihat bahwa terlepas dari pemahaman beberapa ilmuwan sejarah dan sosial yang mempunyai pemahaman berbeda tentang asal-usul pesantren, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang pertumbuhan dan perkembangannya menyatu dengan akar budaya masyarakat di Nusantara. Dalam perkembangannya, kajian-kajian keagamaan, tentunya kajian agama Islam telah dibangun dengan sangat hati-hati dan detail. Kehati-hatian dalam belajar dan mengkaji agama ini terlihat dari diterapkannya secara ketat jenjang-jenjang pendidikan di pesantren-pesantren. Sebagai contoh; pertama-tama, seorang santri perlu belajar hal-hal mendasar tentang cara beribadah atau fikih-fikih (hukum Islam dasar) karena ini adalah hal paling dasar yang harus dikuasai seorang Muslim. Selain belajar tata cara beribadah, seorang santri juga harus belajar tata cara membaca Al-Qur'an.

Kemudian, pada jenjang berikutnya, seorang santri harus mulai belajar bahasa Arab. Dalam belajar bahasa Arab ini, mereka mempelajari tata bahasa Arab dari tingkat dasar, tingkat menengah hingga tingkat lanjut. Jenjang belajar bahasa Arab ini adalah jenjang paling krusial dan biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, dalam proses belajar bahasa Arab ini, para santri juga mempelajari mata pelajaran lainnya seperti sejarah (Tarikh), Fiqh (Hukum Islam), Ilmu hadits dan lain-lain. Jadi, sembari para santri belajar bahasa Arab, mereka juga praktek membaca teks-teks bahasa Arab dari kitab-kitab yang dipakai belajar dalam berbagai mata pelajaran itu.

Jenjang berikutnya, ketika santri sudah menguasai ketrampilan berbahasa Arab, mereka kemudian mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang berbahasa Arab yang umumnya ditulis oleh ilmuwan-ilmuan Islam di abad pertengahan. Dengan pemahaman bahasa Arab yang bagus, tentunya mereka dapat memahami dan mendiskusikan isi dari buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab tersebut.

Jenjang berikutnya, para santri senior wajib mendarmabaktikan ilmunya di pesantren dengan menjadi guru atau ustadz senior yang bertugas mengajar para santri junior atau santri baru. Budaya mengajar ini sangat berarti bagi para santri senior sebagai bekal sebelum mereka pulang ke desa masing-masing.

Jenjang selanjutnya, ketika mereka sudah merasa mempunyai bekal yang cukup, mereka akan pulang ke daerah asal mereka untuk membuka pesantren-pesantren baru. Di era colonial atau di era awal kemerdekaan Indonesia, para santri ini biasanya membuka pesantren-pesantren di daerah asal mereka masing-masing.

Apabila dilihat dari jenjang-jenjang pendidikan di pesantren yang harus dilalui oleh seorang santri ini, terlihat bahwa budaya akademik di pesantren mempunyai jenjang dan akar yang kuat. Pada level dasar, pesantren membangun budaya akademik yang bertujuan untuk membangun karakter para santri untuk menjadi seorang muslim yang kuat dengan memahami dasar-dasar agama islam. Kemudian, mereka membangun ketrampilan berbahasa Arab yang merupakan bahasa Internasional yang digunakan untuk membaca teks-teks berbahasa Arab yang ditulis oleh ilmuan-ilmuan internasional yang tinggal di jazirah Arab. Setelah mereka mempunyai penguasaan berbahasa Arab yang bagus, mereka kemudian mengkaji berbagai literatur berbahasa Arab dan mendiskusikannya. Selain itu mereka kemudian mengajarkannya pada santri-santri baru. Kemudian, sesuatu yang telah menjadi perhatian para ahli Islam dan sejarawan adalah umumnya para santri ini membuka pesantren atau lembaga sekolah baru. Dari sini, jelas bahwa lembaga pesantren di era itu adalah salah satu lembaga dengan budaya akademik level tinggi selayaknya perguruan tinggi di era modern.

MUNCULNYA BUDAYA AKADEMIK BARAT

Budaya akademik Barat di Indonesia telah datang bersamaan dengan datangnya pedagang Portugis ke Sulawesi dan Maluku pada abad ke-16 (Nasution, 2014: 4), yaitu satu abad sebelum kedatangan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) ke Batavia atau Jakarta pada tahun 1602 (Lombord, 2008: 61). Portugis datang ke pulau-pulau Indonesia Timur yang menghasilkan bumbu dan rempah-rempah. Mereka didampingi oleh para misionaris Katolik yang mengembangkan pendidikan sebagai sarana penyebaran agama Katolik dan menarik minat masyarakat setempat untuk menjadi Katolik. Mereka membuka seminari di Ternate dan

Solor dan mengembangkan pendidikan agama Katolik di Goa ke jenjang yang lebih tinggi (Nasution, 2014: 4). Untuk mendukung program mereka, mereka mengirim imam dan guru ke daerah-daerah di Maluku dan Sulawesi (Poerbakawatja, 1970: 22). Kemudian setelah runtuhnya Portugis di Indonesia, Belanda dengan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) menduduki Indonesia pada tahun 1605. Pada tahun 1607, VOC mengembangkan lembaga pendidikan di Indonesia Timur dengan tujuan utamanya untuk menyebarkan Katolik dan menyebarkan Protestantisme dan Calvinisme. Jumlah sekolah meningkat pesat di Ambon dari 16 sekolah pada tahun 1632 menjadi 33 sekolah pada tahun 1645 dengan 1.300 siswa; Namun, jumlah sekolah di abad ke-18 telah berkurang. Pada periode ini, Katolik telah dilenyapkan oleh Belanda dan mereka tidak memiliki kepentingan untuk mempengaruhi Muslim menjadi Kristen (Nasution, 2014: 4-5).

Di bawah kekuasaan VOC, dibangun pendidikan untuk mendidik anak-anak Belanda dan Jawa menjadi pekerja terampil. Gagasan untuk membangun kecerdasan masyarakat Indonesia belum lahir di era ini. Sekolah pertama diadakan di Jakarta pada tahun 1630 yang siswanya berasal dari semua latar belakang negara (Perbakawatja mengatakan bahwa pendidikan di era VOC hanya diberikan kepada anak-anak Kristen) dan mereka diharapkan menjadi pekerja kompetensi untuk VOC. Dalam perkembangannya, enam tahun kemudian, ada 3 sekolah pada 1636 dengan 34 guru dan 4.873 siswa pada 1706 (Nasution, 2014: 5). VOC tidak hanya beraliansi dagang tetapi juga mengembangkan agama Kristen (Poerbakawatja, 1970: 22). Kurikulum sekolah di bawah VOC mengacu pada gereja. Kantor pusat VOC di Belanda pada tahun 1617 memerintahkan gubernur di Indonesia untuk menyebarkan agama Kristen dan mengembangkan sekolah-sekolah untuk itu. Aturan sekolah VOC tahun 1643 menyatakan bahwa guru harus mengembangkan rasa takut akan Tuhan, mengajarkan dasar agama Kristen, mengajar anak-anak berdoa, bernyanyi dan pergi ke gereja, mengajar untuk menaati orang tua, penguasa, dan guru mereka. Tidak ada sistem klasikal, guru mengajar dan memberikan konsultasi secara individu, menyanyi dan membaca teks dilakukan bersama-sama dan tidak ada tingkatan kelas. Guru-guru tersebut berasal dari berbagai latar belakang seperti penjajah, tentara, pembuat peti mati, bahkan mantan Pasteur Katolik dan Rabbi Yahudi. Bagi orang Belanda di Belanda, menjadi seorang guru tidaklah sulit, mereka hanya perlu memiliki kemampuan membaca dan menyanyi. Mereka telah dilatih dan diawasi oleh gereja reformasi di Amsterdam dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengalaman mengajar (Nasution, 2014, 5-6). Pada periode ini, politik bahasa menjadi masalah dalam pengajaran pembelajaran di mana orang dan siswa lebih suka menggunakan bahasa Portugis dan Melayu daripada bahasa

Belanda dan sekolah hanya diberikan kepada orang Belanda dan Kristen Indonesia (Poerbakawatja, 1970: 22). Setelah itu, kondisi pendidikan mulai menurun pada pertengahan abad ke-18. Jakarta memiliki 270 siswa dari 16.000 penduduk, Surabaya hanya memiliki 24 siswa dan telah ada 350 siswa di seluruh wilayah Jawa. Pada tahun 1800, di Jakarta, tidak ada kegiatan guru dan sekolah Belanda. Bersamaan dengan degradasi pendidikan, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda (Nasution, 2014: 7). VOC telah memonopoli perdagangan di seluruh Indonesia selama hampir 200 tahun 1602-1799 sebelum pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaannya di Indonesia. Sepanjang kekuasaan mereka di Indonesia, perdagangan monopoli mereka tidak berbeda dengan kolonialisme karena didukung penuh oleh pemerintah dan pasukan Belanda.

Setelah VOC resmi dibubarkan pada 1 Januari 1800 (Ricklefs, 2011: 168), pemerintah Belanda secara resmi memerintah Hindia Belanda (Indonesia) pada tahun 1816. Kolonialisme Belanda memerintah Indonesia dengan menggunakan undang-undang Hindia Belanda yang menyatakan “tanah jajahan harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perdagangan dan kekayaan pemerintah Belanda”. Bahkan setiap gubernur Belanda di Indonesia dengan sungguh-sungguh berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi pada kenyataannya mereka tetap memegang teguh aturan bahwa suatu negara yang diduduki harus memberikan keuntungan terus menerus kepada Belanda sebagai tujuan pendudukan mereka (Nasution, 2014: 8). Keadaan ini mempengaruhi perkembangan pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang serba kekurangan. Sekolah pertama diadakan untuk siswa Belanda pada tahun 1817 di Jakarta dan kemudian beberapa sekolah juga dibuka di beberapa kota di sekitar Jawa. Setelah itu, ada 7 sekolah pada tahun 1820, 19 sekolah pada tahun 1835, 25 sekolah pada tahun 1845, dan 57 sekolah pada tahun 1857 dan terakhir abad ke-19; program pendidikan universal untuk anak-anak Belanda telah tercapai. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda mengadakan sekolah menengah atas di mana dengan belajar di sekolah ini, para siswa Belanda dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Belanda. Ciri-ciri pendidikan kolonial dimana pemerintah Belanda selalu mengembangkan kualitas pendidikan bagi siswa Belanda lebih baik dari pendidikan untuk siswa lokal dalam hal fasilitas dan isi dan proses pendidikan (2014: 9-10).

Ketika sekolah pertama di era pemerintahan Belanda dikembangkan di Jakarta pada tahun 1817, sekolah pertama untuk bahasa Indonesia telah diadakan pada tahun 1849 (Koentjaraningrat, 1994: 76). Sekolah ini dikembangkan untuk anak-anak Indonesia yang

sebagian besar berasal dari bangsawan Indonesia. Mereka telah dilatih di sekolah untuk menjadi buruh rendahan bagi perusahaan-perusahaan kolonial. Mereka diharapkan menjadi buruh rendah yang dapat mendukung keberhasilan proyek-proyek perdagangan perusahaan kolonial karena memiliki pengaruh tradisional terhadap masyarakat setempat (Nasution, 2014:12). Pemerintah Belanda mengadakan sekolah untuk bahasa Indonesia karena dipengaruhi oleh munculnya gagasan “Etische Politiek” (politik etika) yang bersumber dari artikel Van Deventer yang berjudul “Een Eereschuld” (utang kehormatan) di majalah De Gids . Pokok tulisannya adalah Belanda berhutang kepada rakyat Indonesia karena Belanda telah memeras kekayaan Indonesia. Belanda harus membalasnya dengan mengutamakan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia (Poerbakawatja, 1970: 24; Koentjaraningrat, 1994: 76; Ricklefs, 2011; 228). Ada tiga hal yang menjadi prinsip dasar etika politik yaitu “educatie” (pendidikan), “emigratie” (keimigrasian), dan “irrigatie” (irigasi) (Ricklefs, 2011: 228) dan tujuan utama etika politik adalah pendidikan karena tanpa pendidikan, upaya perbaikan untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia akan sia-sia. Pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara bertahap dalam membangun negaranya merupakan tujuan utama dari etika politik (Nasution, 2014, 15-16).

Sayangnya, baik partai liberal maupun partai politik di Belanda sepakat untuk menerapkan politik etis, politik etis sejatinya telah dilakukan oleh sekelompok kecil orang Belanda (2014: 18). Tidak ada satu pun dari kebijakan politik etis yang dilaksanakan dengan sumber pendukung yang memadai, dan tidak ada satupun program yang mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh para pendukungnya di Belanda (Ricklefs, 2011, 236). Politik etika dapat dikatakan hanya berhasil bagi investor Belanda dan bisnis pemerintah Belanda karena politik etika telah memasok tenaga kerja dan staf terampil untuk beberapa perusahaan dan perkebunan yang dapat meningkatkan keuntungan mereka bahkan hanya dalam dua dekade (Nasution, 2014: 18).

Tidak dapat disangkal, pada awal abad ke-20, dengan pengaruh politik etika, pendidikan anak Indonesia lebih diperhatikan (Barnadib, 1983: 31). Inilah kemajuan pendidikan di Indonesia yang berarti di mana dibuka pendidikan dasar bagi rakyat Indonesia pada tahun 1892-1893; bahkan dalam skala kecil (Ricklefs, 2014: 238). Secara umum ada beberapa sekolah dan jenjang pendidikan pada zaman ini sebagai berikut (Lihat Lampiran No. 7 Sistem Pendidikan pada zaman Kolonial Belanda):

1. Europese Lagere School (ELS) adalah sekolah dasar tujuh tahun untuk siswa miskin Belanda dan Barat. ELS pertama kali diadakan di Batavia pada tahun 1817. Kenyataannya, sebagian besar pelajarnya adalah orang Indo-Belanda yang hidup di tengah masyarakat Indonesia setempat. Melihat siswa Indonesia yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa juga belajar di sekolah ini. Mereka tidak dapat berbicara bahasa Belanda, tetapi setelah perluasan lebih banyak perusahaan Belanda ke Indonesia, lebih banyak siswa Belanda belajar di sekolah ELS. Sekolah ini dirancang sama dengan sekolah dasar di Belanda (Nasution, 2014: 91-92). Siswa ELS dapat mengikuti dua model ujian seperti ujian untuk menjadi Klein Ambtenaars staf pemerintahan yang lebih rendah di kelas 6 dan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, Hogere Burger School, atau sekolah menengah pertama dan atas (2014: 94).
2. Eerste Europese Lagere School (ELS Kelas Satu). Sekolah ini adalah sekolah dasar tujuh tahun yang diadakan pada tahun 1833 untuk menjawab beberapa orang tua Belanda yang tidak ingin anaknya bersekolah di sekolah yang sama dengan siswa kelas bawah Belanda dan lokal. ELS kelas satu ini untuk pelajar elit Belanda dan Barat dan bukan untuk orang Indonesia bahkan mereka dari bangsawan Indonesia. Sekolah ELS kelas satu ini memberikan kualitas yang lebih baik dari ELS. dan biaya sekolah yang sangat mahal membuat orang Indonesia tidak mampu membayarnya. Mahasiswa yang tidak mampu membayar SPP yang mahal harus pindah ke ELS (Nasution, 2014: 92).
3. Kweekschool atau Sekolah Guru atau Sekolah Guru. Selain berbagai jenjang dan model pendidikan di Indonesia, ada juga beberapa sekolah untuk melatih guru. Sekolah guru pertama dibuka pada tahun 1852 di Solo. Sekolah ini diadakan karena kekurangan guru ketika pemerintah Belanda berusaha mengembangkan dan menyebarkan pendidikan ke seluruh Indonesia. Nasution, 2014: 40). Banyak orang Indonesia yang tertarik untuk masuk ke Kweekschool karena mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan ketika bergabung dengan sekolah ini seperti tidak ada biaya kuliah, mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Belanda, lulusan akan mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah umum dengan gaji yang baik yang akan menempatkan status sosial yang terhormat sebagai

intelektual, sekolah ini adalah salah satu cara yang langka bagi masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah untuk menikmati pendidikan lanjutan. Pada kenyataannya, sebagian besar guru berasal dari keluarga menengah ke bawah dan mereka lebih tertarik mengajar di sekolah kelas satu daripada di sekolah kelas dua karena siswa sekolah kelas satu adalah siswa kelas menengah ke atas yang guru-gurunya tinggal di kelas menengah. norma kelas dan cara hidup (2014: 58-59). Kemudian, Hogere Kweekschool (HKS) dibuka pada tahun 1914 di Purworejo, Jawa Tengah. Sekolah ini diperuntukkan bagi calon guru yang akan mengajar di Hogere Inlandse School (HIS). Untuk masuk ke HKS tidaklah mudah, hanya siswa yang memiliki nilai bagus yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Hanya 9 dari 23 lulusan Kweekschool di Bandung tahun 1916 yang lulus ujian masuk HKS. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah, hanya 39 dari 645 siswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Sekolah ini bukan untuk elit sosial Indonesia tetapi untuk elit intelektual Indonesia. Karena sulitnya masuk HKS, lulusan HKS mendapat kehormatan besar dari masyarakat (2014: 115-116).

4. Eerste Klasse School atau Sekolah Kelas Satu (Sekolah Kelas Satu). Sekolah dasar lima tahun ini diadakan pada tahun 1892-3 (Ricklefs, 2011: 238) dan diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga bangsawan yang akan menjadi staf bawah di kantor pemerintahan tetapi, pada kenyataannya, sekolah ini tidak populer di kalangan bangsawan Indonesia. keluarga karena sekolah ini tidak mengajarkan bahasa Belanda dan tidak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Nasution, 2014, 54).
5. Tweede Inlandsche School (TIS) atau Sekolah kelas dua (sekolah kelas dua). Sekolah dasar tiga tahun ini diadakan pada tahun 1892-3 dan diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah. Sekolah ini mengajarkan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dan berhitung. Kemudian, pemerintah menambah kelas sekolah menjadi SD empat dan lima tahun, sama dengan Sekolah Kelas Satu (Nasution, 2014, 61-64). Tidak adanya target yang jelas untuk alumninya membuat pemerintah Belanda khawatir dengan beberapa alumni sekolah ini yang menjadi kelompok intelektual

yang frustrasi karena tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai (2014: 61-62).

6. Volksschool atau Sekolah Desa. Ini adalah model sekolah primitif di mana siswa duduk di lantai dan mereka bisa meletakkan ternak mereka seperti kerbau, sapi, dan kambing di sekitar tempat mereka belajar. Mereka membuat tabel dari artikel peringatan yang mereka gunakan saat belajar. Sekolah dibuka mulai pukul 9.00-12.00 dan pukul 13.00 hingga 15.00. Guru-gurunya adalah alumni sekolah kelas dua. Mereka sebagian besar berusia 13-17 tahun dengan keterampilan dan pengetahuan yang kurang dalam kegiatan belajar mengajar. Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan guru tidak akan melahirkan ide-ide revolusioner dalam masyarakat desa (Nasution, 2014: 82).
7. Hollands Chinese School (HCS). Sekolah Tionghoa tujuh tahun ini diadakan pada tahun 1908 oleh pemerintah Belanda untuk mengurangi minat orang Tionghoa mempelajari budaya dan bahasa mereka. Untuk memberikan pendidikan Belanda murni, pemerintah Belanda menerapkan kurikulum ELS ke HCS. Bahkan kurikulum HCS sama dengan kurikulum ELS, bahasa Belanda tidak diajarkan di HCS karena pemerintah Belanda tidak mau memberikan bahasa Belanda kepada orang lain dari negara lain. Bahasa Tionghoa juga dilarang diajarkan di HCS karena pemerintah Belanda tidak mau mendukung nasionalisme Tionghoa yang dibangkitkan. Orang Tionghoa kemudian menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Inggris (Nasution, 2014: 108).
8. Hollands Inlands School (HIS). Sekolah dasar tujuh tahun ini diadakan pada tahun 1912 karena ada tekanan besar dari organisasi muda Indonesia Budi Utomo yang meminta pemerintah Belanda untuk menyediakan sekolah untuk bahasa Indonesia yang sesuai dengan sistem pendidikan paralel Belanda yang memberi kesempatan kepada siswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. sekolah tingkat seperti Hollands Chinese School (HCS) (Ricklefs, 2014: 239). Akhirnya pemerintah Belanda mengadakan Hollands Inlandse School (HIS) yang menjadi wajah baru sekolah kelas satu dan dua dengan beberapa perbaikan dimana HIS memiliki kurikulum yang sama dengan Europese Lagere School ELS dan Hollands Chinese School (HCS) (Koentjaraningrat, 1994: 77). Kurikulum

sekolah ini sama dengan ELS (bukan ELS First Class). Bahasa Melayu dan bahasa daerah juga diajarkan di sekolah ini tetapi sejarah tidak diajarkan karena sensitif secara politik. Pelajaran penting di sekolah ini adalah bahasa Belanda karena menjadi alasan utama untuk menyelenggarakan sekolah ini. Sebagian besar lulusan sekolah ini lulus Ujian Klein Ambtenaars (ujian pegawai negeri) (Nasution, 2014: 114-115). Kelemahan sekolah ini adalah lulusannya tidak memiliki hubungan lanjutan dengan Hoogere Burger School (HBS atau Sekolah Menengah Atas untuk pelajar Belanda), namun sejak Algemene Middelbare School (AMS atau Sekolah Menengah Atas untuk pelajar Indonesia) diadakan, ditemukan pelajar Indonesia tangga ke Perguruan Tinggi melalui HIS-MULO-AMS (2014:121).

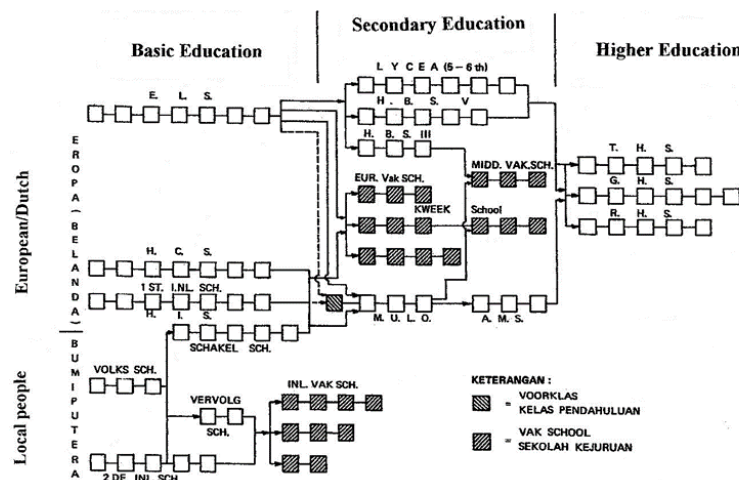
9. Hogere Burger School (HBS). Sekolah menengah 6 tahun ini diadakan pada tahun 1867 oleh raja Belanda. HBS di Indonesia menerapkan standar pendidikan yang sama dengan sekolah yang sama di Belanda. Ada dua bagian tahun ajaran di HBS; pertama, siswa yang memilih lama studi enam tahun, mereka akan pergi ke universitas, kedua, siswa yang memilih lama studi empat tahun, mereka akan pergi ke akademi militer. Siswa di HBS harus memiliki keterampilan yang baik dalam matematika, IPA dan bahasa (Nasution, 2014: 130-132). Karakteristik terpenting dari HBS adalah guru harus memiliki lulusan program PhD atau Doktoral atau diploma MO-B yang setingkat dengan lulusan PhD (2014: 134).
10. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Sekolah dasar tiga tahun (empat tahun dengan persiapan kelas) ini dengan cakupan yang lebih luas dari HIS dibuka pada tahun 1914 (Ricklefs, 2011: 239) dimana lulusan HIS harus bergabung dengan MULO sebelum mereka belajar di AMS (Sekolah Menengah Atas Bahasa Indonesia). MULO bukan sekolah menengah pertama (Nasution, 2014:122), tetapi sekolah ini adalah sekolah menengah pertama dan dikembangkan untuk kelas menengah atas Indonesia, Belanda, Cina dan Eropa yang menyelesaikan sekolah dasar mereka (Ricklefs, 2011: 238) seperti ELS, HCS, dan HIS (Nasution, 2014: 126). Sebagai sekolah yang terhubung dari sekolah dasar seperti ELS, HCS, dan HIS ke HBS dan AMS, MULO lebih banyak mengajarkan pelajaran bahasa Belanda, Prancis, Inggris, dan Jerman daripada mata pelajaran lainnya. Separuh

waktu sekolah dihabiskan untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut, dan sisanya untuk matematika, IPA, dan IPS (2014: 123).

11. Algemene Middelbare School (AMS). Keberadaan MULO sebagai kelanjutan sekolah dasar untuk HIS Indonesia dan kesulitan bagi siswa Indonesia untuk melanjutkan studi melalui ELS-HBS membuat organisasi pelajar muda Indonesia mendesak pemerintah Belanda untuk membuka sekolah menengah atas untuk orang Indonesia di mana siswa Indonesia sebagian besar telah terhambat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya, pemerintah Belanda memutuskan untuk membuka sekolah menengah atas untuk bahasa Indonesia karena mereka khawatir siswa Indonesia akan pergi ke negara lain untuk belajar. Kemudian, AMS dibuka pada tahun 1919 (Nasution, 2014: 137; Ricklefs, 2011: 239). AMS dibagi menjadi dua bagian; bagian B dan A. Bagian B mempelajari matematika dan fisika dan bagian A berfokus pada sastra dan sejarah. Bahkan mahasiswa Indonesia adalah penduduk mayoritas; ada juga beberapa siswa Belanda dan Cina di sekolah ini. Sebagian besar siswa harus menghabiskan 6-7 tahun untuk lulus dari AMS bagian B dan 6 tahun dari AMS bagian A (2014: 138-139).
12. Schakelschool atau Connecting School dibuka pada tahun 1921 untuk menghubungkan siswa Indonesia yang menyelesaikan Volksschool atau Sekolah Desa (Sekolah Desa). Ini adalah sekolah 5 tahun bagi lulusan sekolah desa yang akan melanjutkan studi ke MULO (SMP) (Koentjoroningrat, 1994: 78). Sayangnya, masyarakat Indonesia kelas menengah ke atas tidak memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah lanjutan ini, mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya ke HIS atau sekolah Eropa sedangkan masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah tidak berminat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan berikutnya (Ricklefs, 2011: 241).

Appendix Nomor 1

Sistem pendidikan di era Hindia Belanda



Diambil dari Setiadji et al (1975: 38)

PENDIDIKAN TINGGI DI ERA KOLONIALISME BELANDA

Pendidikan tinggi di Indonesia tidak memiliki sejarah yang panjang (Brodjonegoro dkk, 2001: 363; Cummings, 1981: 34). Sebelum pemerintah Belanda membuka beberapa perguruan tinggi, mereka membuka beberapa sekolah menengah atas yang telah mengembangkan keterampilan khusus siswa mereka seperti Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) atau sekolah pelatihan untuk staf pemerintah pedalaman, School ter Opleiding van In Landseche Artsen atau sekolah menengah atas dokter Jawa (STOVIA) yang diselenggarakan pada tahun 1900 di Batavia dan Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS) atau Sekolah Kedokteran Indie Belanda tahun 1914 di Surabaya, sekolah menengah atas untuk peternakan tahun 1907 di Bogor, sekolah menengah atas untuk hukum tahun 1909 di Batavia (Jakarta), sekolah menengah atas pertanian tahun 1920 di Bogor, sekolah menengah atas kedokteran gigi tahun 1939 di Batavia (Jakarta), dan beberapa sekolah teknik menengah atau sekolah teknik menengah untuk staf jurusan kereta api, staf pos dan telekomunikasi, dan staf bank dan sekolah menengah atas untuk guru (Sekolah Normal dan Kweekschool) (Koentjaraningrat, 1994: 79).

Berkenaan dengan status jenjang perguruan tinggi pertama di Indonesia, peneliti berpendapat berbeda: Nizam (2006:35) menjelaskan bahwa perguruan tinggi pertama adalah sekolah dokter

pribumi sedangkan Brojonegoro (2001:363) tidak. jelas menjelaskan bahwa itu adalah lembaga pendidikan tinggi dengan menyebutkan bahwa itu adalah sekolah pasca sekolah menengah untuk siswa pribumi. Di lain pihak, Koentjaraningrat (1994: 79) menyebutkan dengan jelas bahwa pemerintah Belanda di Indonesia mendirikan Sekolah Menengah Untuk Pendidikan Dokter atau Senior School ter Opleiding van In Landseche Artsen (STOVIA) atau Sekolah Menengah Atas Pelatihan Dokter Pribumi. Dalam hal ini kita bisa merujuk pada tulisan Nasution yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi pertama yang didirikan adalah Sekolah Tinggi Tehnik atau Technische Hogheschool Higher Technical School yang diadakan pada tahun 1920. Pemikiran Nasution perlu kita kemukakan karena tulisannya tentang sejarah Pendidikan Indonesia. di era kolonialisme Belanda adalah salah satu tulisan yang lengkap (Jalaluddin, 1990:11; Sirozi, 2004:18).

Bahkan pemerintah Belanda mengembangkan sekolah menengah atas untuk Indonesia atau Agemeene Middlebare School (AMS) pada tahun 1919, belum ada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia saat itu. Hanya sebagian kecil orang Indonesia yang dapat memasuki sistem pendidikan Belanda dengan mengikuti sekolah menengah atas elit atau Hogere Burger School (HBS) yang berkesempatan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi di universitas-universitas Belanda (Ricklefs, 2011: 239). Pada awal abad ke-20, sudah ada beberapa pelajar Indonesia yang berminat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi di Belanda karena belum tersedianya perguruan tinggi di Indonesia (Koentjaraningrat, 1994: 80).

Pada awalnya, usulan pembukaan perguruan tinggi Indonesia tidak didukung oleh pemerintah Belanda di Indonesia dan di Belanda. Pada tahun 1910, ada anggapan masyarakat bahwa Indonesia belum matang untuk pendidikan tinggi karena tidak ada sekolah menengah atas untuk bahasa Indonesia yang menjadi sumber daya mahasiswa. Alasan publik lainnya adalah Indonesia tidak memiliki atmosfer intelektual dari mana sains berasal (Nasution, 2014: 142-143) dan ada beberapa keraguan publik lainnya yang intinya adalah keraguan dan pendapat pesimis terhadap usulan pembukaan perguruan tinggi di Indonesia. . Untungnya, karena pengaruh Perang Dunia I yang membuat pabrik-pabrik Belanda dan kantor-kantor pemerintah Belanda di Indonesia kekurangan tenaga profesional dan terampil yang tamatan universitas, pemerintah Belanda membuka perguruan tinggi (2014: 142).

Perguruan tinggi pertama di Indonesia adalah Technische Hogeschool te Bandoeng, diselenggarakan pada tahun 1920 (sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB). Itu adalah lembaga swasta yang diubah menjadi lembaga publik (Koentjaraningrat, 1994: 81).

Institusi teknik ini didirikan karena paksaan kekurangan tenaga insinyur dan staf lulusan perguruan tinggi serta karena terputusnya hubungan Indonesia-Belanda akibat Perang Dunia I. Putusnya hubungan Indonesia-Belanda menyebabkan tenaga terampil dan terdidik Orang Belanda tidak bisa datang ke Indonesia untuk bekerja (Nasution, 2014: 142). Pada tahun pertama institut teknik ini pada 1920-1921, ada 28 mahasiswa; 22 pelajar Belanda, 4 Cina, dan 2 pelajar Indonesia. Sayangnya, tidak ada satu pun orang Indonesia di antara 12 lulusan pertama yang terdiri dari 9 orang Belanda dan 3 orang Tionghoa. Ada 4 lulusan Indonesia pada tahun 1925-1926; salah satu wisudawannya adalah Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia (2014: 144). Selanjutnya, kebutuhan akan pengacara dan sulitnya menarik pengacara Belanda untuk bekerja di Indonesia menyebabkan pemerintah Belanda membuka *Rechtshoogeschool* (sekolah hukum) pada tahun 1924 di Jakarta (Sekarang menjadi fakultas hukum universitas Indonesia di Jakarta). Kemudian, untuk melengkapi kekurangan dokter di Indonesia, diadakanlah *Geneeskundige Hogeschool* atau Sekolah Ilmu Kedokteran pada tahun 1927 di Batavia yang menggantikan Sekolah Menengah Atas Dokter Jawa atau *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)* (Koentjaraningrat, 1994: 79; Ricklefs, 2011: 240; Nasution, 2014: 144). Pemerintah juga membuka lembaga administrasi pada tahun 1938 yang disebut *Bestuurs Academie*. Kemudian, tahun berikutnya pada tahun 1939, pemerintah Belanda memiliki ide untuk membuka universitas di Indonesia. Untuk mewujudkan rencana membuka universitas, pemerintah Belanda berencana menggabungkan institut teknik di Bandung, fakultas hukum dan fakultas kedokteran di Jakarta. Mereka juga membuka *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* (fakultas sastra yang diselenggarakan pada tahun 1940 di Jakarta (sekarang menjadi fakultas sastra universitas Indonesia) dan *Faculteit der Landbouwwetenschap* (fakultas pertanian di Bogor pada tahun 1941) (Sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor atau IPB) Sayangnya, sebelum pemerintah Belanda melaksanakan rencananya, perang pasifik telah pecah pada tahun 1942 dan Indonesia mulai diserbu oleh Jepang (Koentjaraningrat, 1994: 82).

Secara umum model pendidikan khas yang dilaksanakan pada masa penjajahan Belanda adalah; 1) merupakan model pendidikan yang sangat bertahap bagi anak-anak Indonesia. Artinya pemerintah Belanda dengan sengaja telah menghambat kelangsungan pembangunan pendidikan bagi anak Indonesia, 2) merupakan model dualisme di mana terdapat perbedaan yang besar antara pendidikan untuk pelajar Belanda dan pendidikan untuk pelajar Indonesia, 3) adanya di kontrol yang kuat dari pemerintah kolonial, 4) memiliki tujuan terbatas untuk sekolah Indonesia, tujuan utama yang penting adalah untuk menghasilkan karyawan untuk

perusahaan-perusahaan Belanda, 5) Program konkordansi yang membuat pendidikan di Indonesia harus sama dengan pendidikan di Belanda, 6) tidak ada rencana pendidikan yang sistematis bagi pendidikan anak Indonesia (Nasution, 2014:20; Moestoko dkk, 1986: 86).

Sistem pendidikan siswa Indonesia pada masa penjajahan sangat rumit (Ricklefs, 2011:24), kelangsungan jenjang pendidikan siswa Indonesia sangat bertahap dimana siswa Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siswa Belanda dalam menyelesaikan pendidikan dasarnya dari SD, sekolah menengah pertama dan atas. Sebagian besar siswa Belanda menyelesaikan pendidikan dasar mereka dalam 12 tahun dari 2 tingkat sekolah seperti ELS (7 tahun) dan HBS (5 tahun), tetapi siswa Indonesia belajar selama 14 tahun dari 3 tingkat sekolah seperti HIS (7 tahun), MULO (4 tahun). tahun), dan AMS (3 tahun), dan siswa Indonesia lainnya menghabiskan 15 tahun dari 4 jenjang sekolah seperti Sekolah Desa (3 tahun), Schakelschool (5 tahun), MULO (4 tahun), dan AMS (3 tahun) (Nasution , 2014: 103; Setiadji, 1976: 38). Sistem persekolahan di Indonesia bersifat mandiri antara satu jenjang sekolah dengan sekolah lainnya. Artinya tidak ada hubungan akademik dan sistem sekolah di antara sekolah-sekolah di Indonesia (Nasution, 2014; 147). ELS dan HBS menerapkan model dan sistem pendidikan sekolah Belanda yang menjadikan kualitasnya lebih baik dari sekolah untuk Indonesia seperti HIS, Village School, MULO, dan AMS. Pemerintah Belanda, meskipun secara formal tidak melarang pelajar Indonesia masuk ELS dan HBS, namun pelajar Indonesia telah dihalangi dan dihalangi untuk memasuki sistem pendidikan Belanda dengan berbagai cara seperti memberikan biaya kuliah yang sangat mahal bagi pelajar Indonesia dan pelajar Indonesia harus mampu berbahasa Belanda sebelum masuk sekolah (Koentjaraningrat, 1984: 78; Ricklefs, 2011: 241; Nasution, 2014: 102).

Sistem pendidikan dikembangkan berdasarkan status kelas sosial dalam masyarakat Indonesia dan dibangun untuk membentuk kelompok elit sosial yang akan digunakan sebagai alat untuk mendukung kepentingan ekonomi dan politik kolonialisme Belanda di Indonesia. Strategi pendidikan ini didasarkan pada strategi kolonial di mana pemerintah Belanda memerintah tanah jajahannya secara tidak langsung dengan menggunakan bangsawan lokal Indonesia. Dengan menerapkan klasifikasi tingkat sosial dalam sistem pendidikan Indonesia, pemerintah Belanda menginginkan situasi “status quo” antara bangsawan dan rakyat jelata. Bangsawan Indonesia yang terpelajar ini ingin memerintah rakyatnya untuk kepentingan kolonial Belanda (Moestoko dkk, 1986: 86-87). Selanjutnya, tujuan utama pendidikan bagi siswa Indonesia pada zaman penjajahan menjadi penting untuk digarisbawahi, tujuan tersebut pada kenyataannya

tidak dinyatakan secara jelas (Moestoko et al, 1986: 109; Setiadji, 1976: 29), tetapi sebagian besar untuk mendidik mahasiswa Indonesia menjadi pekerja kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan karyawan di perusahaan kolonial dengan gaji rendah. Jabatan tertinggi tenaga kerja Indonesia terdidik adalah tenaga teknis dan administrasi yang menjadi tenaga kerja kelas dua atau tiga di kantor dan perusahaan pemerintah Belanda (Setiadji, 1976: 29; Moestoko dkk, 1986: 109; Suryana, 2007: 195).

PENDIDIKAN TINGGI DI ERA JEPANG

Sebelum Perang Dunia II benar-benar berhenti, Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1941 hingga 1945. Tiga setengah tahun masa pendudukan Jepang merupakan periode penentu dalam Sejarah Indonesia (Ricklefs, 2011: 297). Berkaitan dengan pembangunan pendidikan, tujuan utama pendidikan di era Jepang tidak jelas, namun jelas bahwa tujuan utama pembangunan pendidikan Indonesia di era Jepang adalah memenangkan perang dengan menyediakan tenaga kerja rendah (Romusha) gratis dan Prajurit Indonesia yang mendukung kebutuhan militer Jepang. Pelajar harus mengikuti pelatihan fisik dan militer, dan indoktrinasi Jepang yang ketat (Setiadji, 1976: 30; Moestoko et al, 1986: 138). Melalui pendidikan, pemerintah militer Jepang di Indonesia meminta rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan rakyat Jepang untuk mencapai tujuan perang Jepang yang disebut *Hakko Ichiu* atau “Wilayah Kemakmuran Asia Timur Raya”, bahkan pada kenyataannya rakyat Indonesia menjadi sangat miskin dan menderita di era Pendudukan Jepang (Moestoko dkk, 1986: 137).

Sistem sekolah diubah; pengelompokan sekolah berdasarkan latar belakang agama dan status sosial serta negara asal ditiadakan, sistem sekolah dan pendidikan juga disederhanakan dan dibuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadaan ini memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari semua latar belakang sosial untuk mengenyam pendidikan yang sama yang tidak dijumpai di zaman Belanda (Moestoko dkk, 1986: 139; Salim, 2007: 213). Bahasa Indonesia berkembang dengan baik dan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia (Moestoko dkk, 1986: 141) sedangkan pada zaman Belanda penggunaan bahasa Indonesia terbatas. Karena pendidikan lebih menitikberatkan pada latihan fisik dan militer, dengan banyak keterbatasan fasilitas dan sumber daya, guru menjadi lebih kreatif dalam menyediakan alat-alat pengajaran untuk mendukung proses belajar mengajar seperti menerjemahkan beberapa buku teks dari bahasa Belanda dan Inggris ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia

menjadi bahasa pengantar dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Nama jenjang sekolah juga diubah dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia dan Jepang seperti Sekolah Rakyat atau Kokumin Gakko (SD), Sekolah Menengah Pertama atau Shoto Chu Gakko (SMP), dan Sekolah Menengah Tinggi atau Koto Chu Gakko (SMA). Sekolah. Ada juga sekolah kejuruan seperti Sekolah Pertukangan atau Kogyo Gakko (Sekolah Persekutuan), tetapi sekolah hukum dan OSVIA (administrasi) ditutup. Pemerintah militer Jepang membuka sekolah berlayar dan sekolah pertanian atau Nogyo Gakko dan untuk mendidik guru, ada Sekolah Dua Tahun untuk Guru atau Syoto Sihan Gakko, Sekolah Empat Tahun untuk Guru Guto Sihan Gakko, dan Sekolah Enam Tahun untuk Guru Koto Sihan Gakko (Moestoko dkk, 1986: 139).

Pada zaman penjajahan Jepang, hampir semua perguruan tinggi ditutup, tetapi hanya Fakultas Kedokteran Ika Dai Gakko (Sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) di Jakarta dan Sekolah Teknik Kogyo Dai Gakko (Sekarang Institut Teknologi Bandung) di Bandung dibuka. Jepang juga mengadakan sekolah institusi baru untuk staf administrasi atau Kenkoku Gakuin di Jakarta dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor (Moestoko dkk, 1986: 139). Situasi ini terjadi karena pemerintah militer Jepang menjadikan pendidikan sebagai alat propaganda untuk meraih kemenangan dalam Perang Asia Timur melawan Aliansi Barat (Salim, 2007: 213). Dalam hal ini, karena Jepang menduduki Indonesia dalam tiga setengah tahun, ada pandangan dan informasi yang terbatas tentang kondisi pendidikan tinggi pada periode ini. Adalah bijaksana untuk melihat perkembangan budaya akademik tidak hanya dari perspektif pendidikan tinggi, tetapi juga dari keseluruhan sistem jenjang pendidikan.

Bahkan dalam kenyataannya pemerintah militer Jepang telah mempraktikkan prinsip kolonial yang sama dengan pemerintah Belanda sebelumnya bahwa tujuan pendudukan Jepang adalah untuk memenuhi kepentingan perang dan penjajahan Jepang (Ricklefs, 2011: 300), ada beberapa efek positif untuk masa depan. perkembangan dan revolusi pendidikan Indonesia; ada beberapa orang Indonesia, kebanyakan mantan guru, diangkat menjadi pejabat tertinggi pemerintahan dan perusahaan yang ditinggalkan oleh orang Belanda. Orang-orang Indonesia itu bisa belajar bagaimana mengelola kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang belum pernah didapat di zaman Belanda. Kemudian, di era ini, orang Indonesia bisa belajar dan bergabung dengan organisasi militer. Pemerintah militer Jepang memberikan pelatihan perang dan bela diri kepada pemuda Indonesia yang sangat penting bagi masa depan revolusi Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda setelah Jepang meninggalkan Indonesia (Moestoko dkk, 1986: 141). Pemuda Indonesia yang berusia 14 sampai 25 tahun dapat

bergabung dengan organisasi semi militer bernama Seinendan pada bulan April 1943. Bagi mereka yang berusia 25 sampai 35 tahun, mereka harus bergabung dengan korps kewaspadaan yang disebut Keibodan yang pernah bertindak sebagai polisi, pemadam kebakaran, dan pendukung udara Jepang. memaksa. Prajurit pendukung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang yang disebut Heiho diadakan pada tahun 1943 di mana 25 ribu orang Indonesia mendapatkan pelatihan dasar militer yang sama dengan yang diberikan kepada tentara Jepang (Ricklefs, 2011: 305). Selanjutnya, pada bulan Oktober 1943, Jepang mengadakan organisasi muda Indonesia Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) atau Pasukan Pengawal Negara atau Giyugun atau Pasukan Relawan. Para anggota pasukan ini adalah mantan guru, pegawai pemerintah pada masa pemerintahan Belanda, tokoh Islam atau kyai, dan beberapa mantan tentara Indonesia Belanda. Anggota PETA sebagian besar adalah pejuang aktif dalam revolusi Indonesia melawan aliansi dan tentara Belanda setelah kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Panglima militer Indonesia pertama, Jenderal Sudirman, adalah anggota Giyugun dan guru di zaman Belanda dan Jepang (2011:308). Akibatnya, kemenangan Jepang melawan Aliansi Barat membangkitkan banyak nasionalis di Asia dan Afrika termasuk Indonesia untuk melawan kolonialisme (Salim, 2007: 214).

DISKUSI SINGKAT TENTANG BUDAYA JAWA

Jawa adalah bagian dari kepulauan Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia merupakan salah satu kepulauan terbesar dan terpanjang di dunia (Koentjaraningrat, 1983: 1). Indonesia (Hindia) adalah salah satu tempat pandang di dunia di mana beberapa budaya asli yang utuh telah ada dan dipelajari (Kennedy, 1942, 5). Ia memiliki masyarakat yang sangat berbeda budayanya (Barnouw, 1946: 143) dan pada umumnya ditandai oleh masyarakat yang kompleks dan keragaman budayanya (H. Greetz, 1985: 3). Indonesia adalah negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau (ada sekitar 6000 pulau yang berpenghuni), dan terdapat 300 bahasa (Forshee, 2006: 1) dan lebih dari 1000 suku dan sub-etnis bahkan hanya 15 suku yang memiliki lebih dari 1 suku. juta penduduk per kelompok etnis (Suryadinata, Arifin, dan Ananta, 2003: 6; Schwarz, 2000: 5). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010, penduduk Indonesia adalah 237.556.363 jiwa dimana 47.827.027 jiwa penduduk adalah orang Jawa.

Jawa adalah nama sebuah pulau dan juga nama suku bangsa terbesar di Indonesia. Secara kasar, 50% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa yang berpenduduk padat. Di ibu kota Indonesia, Jakarta yang merupakan kota terbesar di Pulau Jawa dan Indonesia berpenduduk sekitar 10 juta

jiwa dan di dalamnya terdapat sekitar 6 juta jiwa bermukim di Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Pulau Jawa (Forshee, 2006: 8). Pulau Jawa merupakan tempat asal orang Jawa. Panjang Pulau Jawa adalah 1200 kilo meter dan lebarnya 500 kilo meter. Daerah asli orang Jawa adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur karena suku lain, Sunda, menjadi penduduk utama di Jawa Barat (Koentjoroningrat, 1983: 3-4). Berkenaan dengan percakapan budaya Jawa dalam penelitian ini, pengelompokan sub topik pembahasan akan menjadi tiga bagian seperti struktur sosial, bahasa Jawa dan orientasi nilai budaya mungkin tidak cukup untuk menjelaskan gambaran yang lengkap tentang hal itu, namun; itu telah memberi kita ide-ide dasar tentang budaya Jawa.

Struktur sosial budaya Jawa

Clifford Greetz (1960) melihat budaya Jawa dari struktur sosial masyarakat dari perspektif kehidupan keagamaan masyarakatnya. Ia meletakkan tiga model masyarakat Jawa yang memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan keyakinan agamanya. Mereka adalah Abangan, Santri, dan Priyayi. Abangan adalah orang Jawa yang mengaku beragama Islam, tetapi mereka mengakui diri mereka sebagai bukan Muslim setia yang tidak menjalankan kewajiban agama Islam, masih menjalankan ritual yang dibawa oleh Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme sebelum Islam datang, mengabaikan detail dari Doktrin Islam tetapi terpesona dengan detail upacara dan ritual. Abangan sebagian besar tinggal di desa atau di pinggir kota sebagai petani, rakyat jelata, pedagang kecil, pekerja informal, dan orang tidak berpendidikan. (C. Greetz, 1960: 178-). Identifikasi abangan ini memiliki kemiripan makna dengan kejawen di mana kejawen Jawa beragama Islam tetapi tidak melaksanakan shalat lima waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan tidak memiliki dorongan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah (Kodiran, 1983: 337). Santri adalah orang Jawa yang memiliki perhatian yang kuat terhadap ajaran Islam lebih dari kesadarannya terhadap ritual Islam. Melaksanakan kewajiban utama agama Islam (Greetz, 1960: 177-179) seperti shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dan memiliki minat yang kuat untuk melakukan haji ke Mekah adalah kewajiban bagi santri (Kodiran, 1983: 337-339). Pada kenyataannya santri itu bermacam-macam, ada santri yang berbeda dengan tetangga abangan mereka hanya karena sikap mereka yang bersikeras bahwa mereka benar-benar muslim, tetapi ada pula yang tidak melakukan itu, dan ada pula yang memiliki komitmen terhadap Islam yang mendominasi hampir seluruh kehidupan mereka (Greetz, 1960: 179). Priyayi adalah orang Jawa yang memiliki keyakinan agama yang sama dengan abangan tetapi posisi kelas mereka di atas abangan, karena mereka memiliki

kebangsawanan dalam masyarakat Jawa sebagai keturunan bangsawan Jawa. Mereka tinggal di kota-kota sebagai pegawai negeri atau pegawai administrasi di kantor-kantor pemerintah di mana pada zaman kolonial mereka telah dipekerjakan oleh penguasa Belanda selama lebih dari 300 tahun. Seorang priyayi memiliki kepekaan yang besar terhadap perbedaan status dengan ekspresi tenang terhadap keunggulan spiritual dan perhatian pada kelancaran spiritual dan perilaku yang santun (1960: 330).

Lebih lanjut, Kodiran (1983: 337-340) tidak menempatkan priyayi sebagai bagian dari keyakinan agama orang Jawa. Ia menempatkan priyayi sebagai elemen sistem sosial bersama wong cilik atau rakyat biasa. Ia tidak meletakkan sifat keagamaan apapun baik kepada priyayi maupun wong cilik sementara ia memasukkan pegawai negeri atau pegawai pemerintah dan orang-orang terpelajar ke dalam priyayi dan memperhitungkan petani, pekerja informal, kuli, dan pedagang kecil ke dalam wong cilik. Berbeda dengan Geertz yang menempatkan keluarga kerajaan dan bangsawan ke dalam priyayi, Kodiran tidak memasukkan mereka ke dalam Priyai, baginya keluarga kerajaan dan bangsawan adalah kelompok yang berbeda dari priyayi tetapi dia menempatkan mereka pada tingkat yang sama dengan priyayi. Dalam struktur sosial masyarakat Jawa, priyayi dan bandara menjadi kelas tertinggi sedangkan wong cilik menjadi kelas terendah. Selain itu, berdasarkan kriteria latar belakang agama, Kodiran menyebutkan dua model kriteria agama orang Jawa, yaitu santri dan kejawen sedangkan Geertz memiliki tiga; abangan, santri, dan priyayi. Kejawen menurut Kodiran adalah orang Jawa yang menganut ajaran Islam tetapi tidak taat menjalankan sila dan rukun Islam; mereka tidak sholat lima waktu dalam sehari, tidak pernah berpuasa di bulan Ramadhan, dan tidak memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kemudian santri, sebaliknya, adalah orang Jawa yang selalu taat mengamalkan rukun dan ajaran Islam dalam kehidupannya. Dari penjelasan tersebut, dalam hal keyakinan agama mereka, kejawen dan santri memiliki karakteristik yang sama dengan abangan dan santri pada penjelasan Geertz. Dalam kehidupan mereka, hampir semua orang Jawa dalam segala variannya terutama abangan, kejawen, priyayi, keluarga kerajaan bahkan sebagian santri percaya akan adanya sesuatu yang tidak kasat mata yang memiliki kekuatan lebih dari apapun yang diketahui memiliki kekuatan, seperti kasekten atau kesaktian, jiwa atau roh nenek moyang, dan makhluk gaib atau astral seperti hantu yang hidup di sekitar lingkungannya. Mereka menganggap makhluk gaib tersebut dapat menyebabkan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, dan kebahagiaan atau sebaliknya dapat menyebabkan gangguan pikiran, gangguan kesehatan, atau bahkan kematian (Kodiran, 1983: 340; C.Greetz, 1960: 9-28; Raffles, 2014: 155).

Dalam kehidupan nyata masyarakat Jawa, orang Jawa masih membedakan antara priyayi (pegawai negeri, orang terpelajar, keluarga kerajaan) dan wong cilik atau abangan (petani kecil, pedagang kecil, dan pekerja informal) (Kodiran, 1983: 337). Keadaan ini menyebabkan abangan atau wong cilik yang sebagian besar mengidealkan priyayi atau keluarga kerajaan (Geertz 1960: 329) mengikuti atau mempraktekkan cara hidup priyayi terutama ketika mereka telah berhasil berpindah dari petani kecil dan pedagang menjadi orang Jawa yang kaya. Santri juga akan meniru cara hidup priyayi atau keluarga kerajaan tetapi tidak dengan kehidupan keagamaan mereka (1960: 368). Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat wong cilik atau abangan pergi ke kota untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga tidak hanya untuk membangun kembali kondisi ekonomi mereka tetapi juga untuk menjadi pegawai negeri. Artinya wong cilik atau abangan menjadi Priyayi dalam mobilitas sosialnya dan mereka menerapkan cara hidup priyayi seperti adat dan tradisi, sistem orientasi norma dan nilai budaya (Koentjoroningrat, 1994:444).

Bahasa Jawa sebagai bagian penting dari budaya Jawa

Selain itu, penggunaan bahasa Jawa juga menjadi gambaran signifikan budaya Jawa. Bagi orang Jawa, ketika berbicara tentang hubungan sosial, penting untuk berbicara tentang bagaimana orang menghormati orang lain. Kehormatan ditunjukkan dengan beberapa cara seperti bahasa tubuh, posisi tangan, nada suara, dan kata ganti orang lain terutama orang yang kita ajak bicara sangat penting dalam bahasa Jawa (H. Geertz, 1985: 23). Dalam berbicara dengan orang lain dalam bahasa Jawa, seseorang harus memperhatikan kedudukan orang lain yang diajak bicara dan orang yang dibicarakan seperti status sosial, usia, keturunan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, senioritas bahkan kebangsaan. Kemudian, mereka harus memutuskan secara tepat bahasa Jawa apa yang akan mereka gunakan (Kodiran, 1983: 322; Koentjoroningrat, 1994: 22; Geertz, 1960: 358).

Awalnya, ada dua jenis utama bahasa Jawa; yaitu bahasa Jawa untuk sastra dan bahasa Jawa saat ini untuk komunikasi sehari-hari (Koentjoroningrat, 1994: 17-18). Dalam diskusi ini, bahasa Jawa untuk komunikasi sehari-hari menjadi objek utama dalam percakapan ini. Ada dua bahasa Jawa sehari-hari sejak abad ke-20; mereka adalah Ngoko dan Kromo (Kodiran, 1983: 322; Koentjoroningrat, 1994: 22-23; Geertz, 1960: 358-362; H. Geertz, 1985: 23). Bahasa Ngoko digunakan ketika seseorang berbicara dengan orang yang lebih muda, seseorang

dengan status sosial yang lebih rendah, orang yang memiliki status dan usia yang sama atau teman dekat. Ngoko memiliki dua varian; ngoko lugu dan ngoko andap (Kodiran 1983: 322-323). Ngoko lugu jelas menggunakan kosakata ngoko sedangkan ngoko andap menggunakan kombinasi kosakata ngoko dan kromo. Ngoko lugu digunakan ketika orang berbicara dengan teman dekat atau orang dengan status sosial yang lebih rendah dan ngoko andap digunakan ketika seseorang berbicara dengan teman atau orang lain yang setara dalam status sosial tetapi mereka tidak terlalu dekat satu sama lain. Sebaliknya, krama digunakan untuk berbicara dengan seseorang yang baru pertama kali bertemu dan seumuran atau seseorang yang lebih tua usianya dan status sosialnya lebih tinggi (1983:323). Kemudian, ada krama inggil yang memiliki pengertian lebih tinggi daripada krama karena bahasa ini khusus digunakan untuk seseorang yang benar-benar lebih tua usianya dan lebih tinggi status sosialnya. Krama inggil memiliki 300 kata untuk menyebut beberapa bagian tubuh manusia, kegiatan, hal-hal yang dimiliki, karakter dan emosi orang tua (koentjoroningrat, 1994: 21; Kodiran 1983: 323). Selain itu, dari kedua bahasa Jawa sehari-hari utama tersebut terdapat beberapa variasi dan kombinasi ngoko dan krama seperti bahasa Jawa madya yang terdiri dari madya ngoko, madya antara, dan madya krama (Kodiran, 1983: 323; Koentjoroningrat, 1994: 21; Geertz, 1960: 358-362). Setelah itu, ada juga beberapa bahasa Jawa lainnya seperti Kedaton, Krama Desa, dan Jawa Kasar. Kedaton atau Bagongan khusus digunakan di keraton dan memiliki karakter dan perbendaharaan kata yang hampir sama dengan krama inggil. Kemudian krama desa adalah bahasa penduduk desa dan Jawa kasar adalah bahasa yang digunakan orang Jawa ketika marah dan memfitnah (Kodiran, 1983: 323).

Bahasa Jawa merupakan unsur etiket Jawa yang menjadi modal emosional untuk membahagiakan orang lain (Geertz, 1960: 363). Namun, sebagian orang Jawa menganggap bahasa Jawa itu rumit sehingga membuat mereka canggung untuk diajak bicara. Kondisi ini membuat sebagian orang Jawa lokal yang sudah lama bersekolah di sekolah Belanda memilih untuk berbicara bahasa Belanda dalam komunikasi mereka (Koentjoroningrat, 1994: 22). Saat ini, untuk menghindari kecanggungan karena etika berbahasa Jawa, sebagian orang Jawa memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional dan tidak memiliki stratifikasi budaya. Namun, di kalangan orang Jawa, mereka masih lebih suka menggunakan bahasa Jawa baik dalam komunikasi formal maupun nonformal dalam kegiatan sehari-hari.

Orientasi Nilai Budaya Jawa

Dalam percakapan budaya Jawa, membahas orientasi nilai-nilai petani atau penduduk desa (kelas bawah Jawa) dan priyayi (kelas atas Jawa) sangat penting. Koentjoroningrat (1994: 435-443) mengklarifikasi orientasi nilai-nilai tersebut dengan menggunakan kerangka yang telah dikembangkan oleh C dan F. Kluckhohn dalam mempelajari variasi orientasi nilai-nilai budaya (Kluckhohn dan Strodtbeck: 1961). Kluckhohn secara universal membagi nilai-nilai budaya seluruh bangsa di dunia ke dalam lima kategori berdasarkan lima masalah penting dalam kehidupan manusia seperti (1) masalah universal pada esensi kehidupan; (2) masalah universal tentang hakikat kerja dan usaha manusia; (3) masalah universal tentang hubungan antara manusia dan alam; (4) persepsi manusia tentang waktu; (5) masalah universal dalam hubungan antar manusia itu sendiri (Koentjoroningrat, 1994: 435).

Dalam membicarakan persoalan-persoalan universal tentang hakikat kehidupan, bahkan sebagian besar petani tidak memiliki perhatian dan tradisi untuk memikirkan hakikat kehidupan, sebagian dari mereka telah memiliki gambaran tentang hakikat kehidupan dengan membaca kitab-kitab adat Jawa yang mengajarkan tentang norma dan norma. tokoh-tokoh yang dipengaruhi sastra Jawa dan wayang golek (Koentjoroningrat, 1994: 435). Pengaruh sastra Jawa dan cerita dalam pertunjukan wayang kulit atau wayang kulit Jawa yang mengandung ajaran moral menyebabkan tidak adanya perbedaan dalam memandang hakikat kehidupan antara petani yang melek huruf dan priyayi. Tapi, bagi warga desa buta huruf yang sangat melarat, prinsip utama mereka adalah menerima takdir. Mereka percaya bahwa hidup adalah rangkaian peristiwa yang penuh dengan kesengsaraan yang harus mereka terima dan jalani dengan tabah dan pasrah (1994:435). Apalagi bagi kaum priyayi, mereka juga memiliki kesamaan pemikiran dengan penduduk desa dalam melihat esensi kehidupan yang mereka yakini pada konsep takdir dan pada aspek negatif kehidupan yang pada hakikatnya merupakan rangkaian ketidakbahagiaan. Mereka juga menyadari bahwa usaha itu sulit dan berat, tetapi orang harus melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kondisi mereka (1994: 437).

Dalam melihat esensi kerja dan etos kerja, warga desa akan bingung menjawab pertanyaan apa tujuan mereka bekerja keras dalam hidup dan apa yang mereka inginkan dari kerja keras itu bahkan akhirnya mereka hanya menjawab untuk makan. Lebih lanjut, penduduk desa yang agak terpelajar akan memberikan jawaban yang mendalam dengan mengaitkan perjuangan manusia dengan pahala Tuhan dan kehidupan baru di akhirat ketika mereka berbicara tentang

tujuan akhir kehidupan dan beban usaha manusia (Koentjoroningrat, 1994: 437). Sama halnya dengan penduduk desa yang agak berpendidikan, priyayi juga mengaitkan tujuan akhir pekerjaan mereka dengan pahala atau pahala kecuali mereka yang mengikuti filosofi batin yang akan menghubungkannya dengan tujuan nyata yang nyata. Mereka percaya bahwa dengan bekerja keras mereka akan mendapatkan imbalan nyata yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Pemikiran ini mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Eropa yang sesuai dengan keinginan priyayi Jawa akan kekuasaan dan kedudukan, simbol fisik kekayaan, dan hubungan dekat dengan orang-orang yang berada di posisi atas dan tinggi (1994: 438).

Dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dan alam, penduduk desa tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis kekuatan alam, tetapi mereka telah memilih untuk hidup dengan alam secara harmonis (Koentjoroningra, 1994: 438). Masyarakat Jawa, bahkan penduduk desa yang paling bodoh sekalipun, merasa berkewajiban untuk menerapkan konsep “memayu-ayuning bawana” atau “memperindah keindahan dunia”. Beberapa orang Jawa memahami konsep ini berdasarkan kata-kata yang sebenarnya dalam arti biasa bahwa manusia harus menjaga dan memperbaiki lingkungannya seperti pekarangan rumah, pekarangan di sekitar desa dan sebagainya; Namun, sebagian dari mereka memahami konsep tersebut secara abstrak, mereka percaya bahwa manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan spiritualnya seperti adat, tradisi, tujuan dan nilai-nilai budaya umum dalam masyarakat, serta aspirasi dan nilai-nilai individu. Lebih jauh, priyayi yang bekerja dan tinggal di kota percaya pada konsep harmoni dan berbicara tentang hubungan antara manusia dan alam juga. Priyayi mengembangkan saraseyan atau kelompok diskusi. Kelompok-kelompok tersebut berbicara panjang lebar dan jelas tentang konsep harmoni dan hubungannya dengan ide-ide mistik, religiusitas, keberadaan Tuhan, dan takhayul kekuatan alam (1994: 439).

Ketika kita membahas tentang persepsi orang Jawa tentang waktu, kita akan menemukan bahwa masyarakat desa Jawa memiliki persepsi yang rumit tentang waktu. Mereka memiliki berbagai model kalender untuk tujuan yang berbeda. Mereka akan menggunakan metode yang sulit untuk menggabungkan beragam bentuk kalender untuk menentukan tanggal yang baik untuk memulai kegiatan yang sangat penting seperti kapan petani harus mulai menanam padi musim ini dan kapan pesta pernikahan harus diadakan. Metode dan sistem penanggalan tersebut mengandung pertimbangan keagamaan dan magis (Koentjoroningrat, 1994: 439). Sebaliknya, orientasi waktu priyayi berorientasi pada waktu lampau. Kehidupan mereka yang tidak banyak variasi dan pekerjaan kantor mereka yang terdiri dari kegiatan sehari-hari yang

serupa, hobi mereka yang sibuk dengan hal-hal yang diturunkan dari leluhur mereka dan melakukan ritual rumit untuk merawat pusaka mereka, kebiasaan mereka yang sangat gemar menyelidiki silsilah nenek moyang mereka, sejarah kepahlawanan, mitologi, dan karya-karya pengarang lama adalah aktivitas yang menjadi ciri gaya hidup priyayi tradisional yang memberi makna pada kehidupan mereka (1994: 439-440).

Dalam memandang hubungan antar manusia, baik warga desa maupun priyayi melihat bahwa hubungan mereka dengan sesama sangat penting dalam kehidupan mereka. Keduanya tidak hanya memiliki budaya kolateral untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga, kerabat dan tetangga tetapi juga memiliki nilai orientasi budaya vertikal untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang penting dan orang-orang yang berasal dari tingkat yang lebih tinggi (Koentjoroningrat, 1994: 440-441). Pepatah masyarakat desa memiliki peribahasa “makan makan atau tidak makan, yang terpenting hidup bersama keluarga”, ungkapan ini mungkin memiliki makna bahwa penduduk desa Jawa lebih suka memilih tinggal bersama keluarganya meskipun kondisi ekonominya sedang buruk, meninggalkan keluarga mereka untuk kondisi ekonomi yang lebih baik. Dalam orientasi hubungan budaya vertikalnya, warga desa merasa sangat tergantung untuk mendapatkan dukungan dan restu dari orang-orang penting seperti orang lain yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi, staf pemerintah desa, senior dan orang tua. Bahkan model hubungan masyarakat desa dengan orang lain yang memiliki posisi lebih tinggi tidak terjadi setiap hari, ketika mereka bertemu dengan bos mereka atau orang lain yang berada di posisi tinggi, mereka akan menghindari masalah dengan diam atau setuju dengan tulus tanpa perasaan untuk bertanggung jawab. atau tidak memiliki emosi pada tindakan tersebut. Bahkan nilai-nilai orientasi budaya vertikal di kalangan remaja saat ini sudah menurun, budaya ini masih ada (1994: 441-442). Prinsip-prinsip hubungan dengan orang lain bagi priyayi ditandai dengan nilai-nilai budaya kolateral, bahkan sikap mereka untuk berbagi dan hidup bersama dalam komunitas mereka untuk berbagi perasaan dan kondisi yang sama tidak terlalu kuat. Bagi priyayi, adat dan etiket mereka berorientasi pada nilai-nilai budaya vertikal yang ditunjukkan dengan sikap mereka sebagai individu yang sangat bergantung, percaya dan menghormati senior dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki semangat untuk berjuang untuk bertanggung jawab atas hidup dan diri mereka sendiri. Karakter dan sikap orang Jawa ini sudah ditanamkan sejak kecil; Karakter manut (taat) yang cenderung mengikuti aturan sesuai dengan orientasi nilai budaya vertikal mereka. Orientasi nilai budaya ini sesuai dengan mentalitas PNS (1994:442).

Dari percakapan di atas, telah ada garis bawah penting dalam budaya priyayi daripada budaya abangan atau petani, dan santri karena pada tiga tema diskusi; struktur sosial, bahasa Jawa dan orientasi nilai budaya, priyayi memiliki peran yang kuat dalam mempengaruhi budaya orang lain. Bahasa, tata krama, agama, seni, gaya hidup priyayi, bagaimanapun, adalah idealisme bagi petani atau abangan bahkan terlalu sulit untuk ditiru dan diterapkan oleh mereka. Santri tidak meniru agama dan seni priyayi, tetapi mereka menjadikan tata krama, bahasa, dan gaya hidup priyayi sebagai model yang ideal (Geertz, 1960: 368).

Dari pembahasan orientasi struktur sosial, bahasa, dan nilai budaya masyarakat Jawa, terdapat karakter budaya yang penting untuk digarisbawahi. Ini adalah sikap pasif dari abangan, petani atau penduduk desa dan priyayi (Kodiran, 1983: 343). Sikap pasif mereka yang menjadi ciri masyarakat desa dan priyayi Jawa adalah konsep manut atau ikut dan rukun atau rukun. Bagi warga desa, manut atau mengikuti ide dan perintah orang lain tanpa bertanya atau berdebat diakui sebagai sikap yang terpuji. Rukun atau menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain berarti menghindari konflik dengan orang lain dalam suatu kelompok dianggap sebagai sikap yang terpuji. Dalam keluarga priyayi, manut juga merupakan sikap penting yang diyakini akan memberikan kehidupan sukses priyayi muda ketika ia menjadi pegawai negeri di masa depan sedangkan rukun memiliki arti yang lebih luas daripada konsepsi penduduk desa di mana bagi seorang priyayi, rukun atau rukun terdiri dari tidak hanya makna praktis untuk menjaga solidaritas kelompok tetapi juga makna filosofis dan abstrak untuk mengembangkan dan memperkuat pertimbangan identitas sosial bagi dirinya sendiri (Koentjaraningrat, 1994: 254-255). Dengan demikian, sikap pasif mereka dalam memandang kehidupan mereka, gagasan yang kuat terhadap konsep untuk ikhlas menerima apa pun atau berapa banyak hal yang mereka miliki dan dapatkan, dan keteguhan hati mereka untuk bahagia dalam kondisi menderita, dan implementasi konsep-konsep tersebut. manut dan rukun, tetapi lemah dalam berkarya dan berkeaktivitas akan menjadi hambatan besar bagi orang Jawa dalam membangun negerinya (Kodiran, 1983: 343).

Selain konsep manut dan rukun, masyarakat Jawa khususnya priyayi memiliki prinsip hidup yang pesimis. Mereka terus menerus mengajar anak-anaknya untuk berhati-hati terhadap kesulitan dan kegagalan yang mungkin dihadapi anak-anak mereka dalam hidup mereka. Dengan demikian, anak-anak mereka selalu diingatkan akan konsep eling atau mengingat dan prihatin atau sederhana (Koentjoroningrat, 1994: 255). Eling berarti orang Jawa, dalam menjalani hidupnya harus ingat untuk berhati-hati terhadap apa pun dan mengingat Tuhan yang

mengatur kehidupan manusia dan prihatin berarti hidup sederhana sekalipun orang Jawa dalam keadaan sangat kaya dan dalam kedudukan yang baik. pekerjaan atau di zona menyenangkan.

Nilai khusus lain yang menjadi ciri budaya Jawa adalah nilai-nilai Jawa pada konsep rasa hormat atau urmat atau aji yang memiliki arti khusus bagi mereka. Hormat memiliki arti kompleks yang memiliki sedikit kesamaan dengan kata hormat dalam bahasa Inggris. Hormat dalam hal ini tidak datang dari sikap individu tetapi dari status sosial, kedudukan, dan pekerjaan seperti ayah dalam keluarga, kepala desa, atau pejabat pemerintah yang berpendidikan. Bagi orang Jawa, mereka mengabaikan apakah seseorang memiliki kehormatan batin atau dia hanya merasa terhormat atas apa yang telah dilakukannya (Geertz, 1983: 115). Orang Jawa akan memilih untuk memberikan kehormatan dalam interaksi sosial publik terhadap seseorang yang berselisih dengannya daripada menunjukkan kepada publik bahwa ia memiliki masalah dengan orang lain. Tindakan ini akan membuat semua orang merasa senang dan bahagia bahkan tidak akan menyelesaikan masalah mereka. Contoh ini bukan berarti rasa hormat tidak memuat aspek emosional. Ada tiga aspek emosional yang melekat pada rasa hormat, yaitu wedi, isin dan sungkan. Wedi takut dalam arti perasaan takut yang nyata dan ketakutan secara sosial akan konsekuensi dari tindakan yang tidak menyenangkan seperti seorang gadis takut keluar karena kegelapan atau jika seseorang berhutang uang dari tetangganya, dan dia tidak dapat mengembalikan uang itu, dia akan takut pada tetangganya. Apalagi isin atau malu adalah rasa malu ketika bertemu dengan orang lain yang lebih tua, lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih tinggi kedudukannya darinya, misalnya anak Jawa akan dipuji jika takut pada orang tuanya atau malu pada orang yang lebih baik. daripada dia (1983: 116). Kemudian, sungkan adalah istilah tradisional Jawa, artinya sopan santun yang hampir sama dengan takut tetapi tanpa rasa bersalah, itu adalah sopan santun atau sopan santun untuk menghormati orang lain dengan enggan kepada orang lain misalnya seseorang akan menawarkan tamunya dengan mengatakan “ ojo sungkan-sungkan” atau jangan segan-segan menikmati teh (1983: 119).

Dalam penjelasan budaya Jawa, ada dua ciri utama yang mewarnai budaya masyarakat Jawa. Ciri-ciri tersebut adalah pasif dan pesimis dalam memandang kehidupannya (Kodiran, 1983: 343; Raffles, 2014: 158; Koentjoroningrat, 1994: 255). Orang Jawa pada dasarnya berambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan reputasi yang baik, tetapi penindasan nasional yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan sikap pertanian telah menyebabkan mereka kehilangan minat terhadap kekuatan militer dan kehilangan semangat perang nenek moyang mereka. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai individu yang pasif daripada sebagai

pribadi yang berani dan aktif. Orang Jawa ternyata mampu hidup dengan sabar dalam kemiskinan daripada berusaha dengan semangat kewirausahaan (Raffles, 2014:158). Di era kemenangan raja-raja Jawa, para raja dan bangsawan feodal sebelum kolonialisme menjalankan pemerintahan yang menindas (Kodiran, 1983: 343). Sebelum dan di era kolonialisme, kelas elit Jawa, priyayi dan keluarga kerajaan, memiliki dominasi mutlak dan memerintah kegiatan pemerintahan, menikmati kebesaran mewah, mengumpulkan kekayaan, dan menguasai pelayanan publik adalah orang-orang yang licik dan korup sedangkan orang-orang kelas bawah atau petani pada awalnya jujur. dan orang baik, terbuka dan jujur dalam berbisnis (Raffles, 2014:157). Kemudian pemerintahan kolonial Belanda yang represif yang berkuasa sejak abad ke-18 (Kodiran, 1983: 343) dan menguasai Jawa selama lebih dari 300 tahun (Geertz, 1960: 330) telah memberikan dampak yang mendalam bagi kehidupan masyarakat dan petani Jawa (Kodiran, 1983). : 343). Hal ini menyebabkan budaya dan mentalitas masyarakat Jawa berubah menjadi pasif dan pesimis dalam memandang kehidupan dan kasar dalam menyelesaikan masalah. Maraknya kejahatan yang pernah melibatkan masyarakat Jawa di era kolonialisme Belanda adalah karena hukuman berat dan perlakuan buruk dari penguasa kolonial (Raffles, 2014:157-160).

Pengamatan yang akurat terhadap kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial masyarakat Jawa di desa dan kota memberikan kesan bahwa masyarakat Jawa telah bergerak maju dengan cepat ke dalam gelombang peradaban dunia saat ini, tetapi orientasi nilai budaya, sikap mental, dan gaya hidup PNS Jawa ' (priyayi) menjadi kendala utama (Koentjoroningrat, 1994: 446). Dalam hal ini, Koentjoroningrat (1994) menyarankan kita untuk melakukan penelitian intensif untuk menguji hipotesisnya yang menyatakan "... jika suatu budaya atau sub-budaya dalam kelas tertentu dalam suatu masyarakat memiliki tradisi kuat yang telah diwariskan secara turun-temurun di dimana masyarakat telah berusaha mempertahankan tradisi lama dan lama, maka akan ada kecenderungan munculnya sikap resisten intensif terhadap perubahan budaya atau resistensi intensif terhadap datangnya perubahan budaya mungkin tidak akan terjadi dalam suatu budaya dan sub-budaya. dalam masyarakat yang tidak memiliki tradisi lama" (1994: 446). Hipotesis ini merupakan pertanyaan penting yang juga akan dikaji dan dijadikan pedoman dalam penelitian ini bahkan ini akan difokuskan dalam mempelajari budaya di bidang akademik.

PENDIDIKAN TINGGI DI ERA SOEKARNO

Kebijakan pendidikan

Di era kemerdekaan Indonesia setelah tahun 1945, pembangunan pendidikan didasarkan pada UUD 1945 bab XIII, pasal 31, dan ayat 1 yang menjelaskan “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Dalam undang-undang pendidikan tahun 1950 dan 1954 pasal 17 dijelaskan bahwa “setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima sebagai siswa di sekolah, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk program belajar mengajar di sekolah itu” (Setiajardi, 1976: 45). Tujuan pendidikan yang tercantum dalam UUD 1945, pengembangan sistem pendidikan, kurikulum dan semua produk kebijakan pemerintah di bidang pendidikan didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara atau lima pilar prinsip dasar negara Republik Indonesia: percaya pada satu Tuhan; kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk toleransi terhadap semua orang; kesatuan Indonesia; demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan musyawarah antar wakil rakyat (Moestoko dkk, 1986: 145; UNESCO, 2011).

Kebijakan pendidikan di era Soekarno telah beberapa kali mengalami perubahan mengikuti situasi politik di mana orang Belanda mencoba untuk menduduki Indonesia kembali. Perubahan konstitusi Indonesia dan produk hukum lainnya telah mengikuti beberapa kesepakatan politik antara Indonesia dan pemerintah Belanda seperti Perjanjian Linggarjati (1946), Perjanjian Renville (Januari 1948), dan Den Haag Roundtable (1949) (Moestoko dkk, 1986: 144 ; Ricklefs, 2011: 337-350). Undang-undang pendidikan di era Soekarno telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama terjadi ketika Republik Indonesia atau Republik Indonesia berubah menjadi Indonesia Serikat atau Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949, fondasi dasarnya tidak diubah, tetapi tujuan pendidikan diubah oleh Mr Assaat Presiden Republik Indonesia Serikat yang mengeluarkan undang-undang pendidikan nomor 4 tahun 1950 pasal 2 pasal 3 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang berbudi pekerti, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan negara. Moestoko dkk, 1986: 149). Kemudian undang-undang pendidikan nomor 12 tahun 1954 memutuskan untuk menerapkan undang-undang pendidikan nomor 4 tahun 1950 yang isi kedua undang-undang tersebut adalah sama (Moestoko dkk, 1986: 173). Selanjutnya, Keppres nomor 145 Tahun 1965 merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia harus sesuai dengan gerakan politik Sukarno yang disebut Manipol-Usdek singkatan

dari Manifesto politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia atau Manifesto Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Konsep politik ini ditetapkan menjadi kebijakan politik negara oleh Sukarno di mana orientasi politiknya mengacu pada negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, dan Eropa Timur. Dalam kebijakan ini, tujuan pendidikan adalah mengembangkan masyarakat Indonesia sosialis yang menempatkan kepentingan pribadi sebagai kebutuhan sekunder, tetapi keberadaan tujuan ini sangat singkat karena pemberontakan komunis pada tanggal 30 September 1965 yang disebut G 30 S PKI pada tahun 1965 pecah (Moestoko dkk, 1986: 173). Selanjutnya Ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk mencabut Ketetapan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 dan Ketetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pancasila. Sistem Pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dalam Ketetapan MPRS bab II pasal 3 ini adalah untuk mengembangkan manusia Pancasila yang sejati berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (Moestoko dkk, 1986: 175).

Perkembangan pendidikan tinggi

Kondisi perguruan tinggi di era Soekarno tidak berkembang dengan baik karena dalam masa peralihan dari era penjajahan Jepang sedangkan pada saat itu Belanda berusaha menduduki Indonesia kembali. Belanda telah mendarat dan menduduki kembali beberapa wilayah Indonesia setelah pemerintah militer Jepang menyerah kepada pasukan Aliansi pada tahun 1945. Situasi ini mempengaruhi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi dua bagian; beberapa lembaga pendidikan tinggi berada di bawah payung pemerintah Belanda dan yang lainnya berada di bawah pemerintah Indonesia. Pemerintah Belanda mengembangkan Ika Daigaku menjadi Institut Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Hukum, Sastra dan Filsafat pada tahun 1946 di Jakarta sebagai salah satu daerah di bawah pemerintahan Belanda (Moestoko dkk, 1986:163). Sekolah-sekolah tersebut ditutup sebelum aksi militer pada tahun 1947, tetapi Nood-Universiteit atau “Universitas Darurat” dibuka pada bulan Januari 1946 oleh pemerintah Belanda yang terdiri dari beberapa fakultas seperti kedokteran, hukum, sastra, filsafat, pertanian di Jakarta, dan fakultas teknik. di Bandung. Nama Universitas Darurat diubah menjadi Universiteit van Indonesie atau Universitas Indonesia pada bulan Maret 1947 (Moestoko dkk, 1986:164). Pada tahun 1948, Universitas Indonesia memiliki fakultas yang lebih luas dari sebelumnya di beberapa kota di wilayah kekuasaan pemerintah Belanda seperti

fakultas hukum dan pengembangan masyarakat, fakultas kedokteran dan fakultas sastra dan filsafat di Jakarta, fakultas teknik dan fakultas ilmu alam. di Bandung, fakultas pertanian dan fakultas kedokteran hewan di Bogor, fakultas ekonomi di Makassar, dan fakultas kedokteran di Surabaya (1986: 165). Sedangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat beberapa perguruan tinggi di beberapa kota seperti Universitas Gadjah Mada atau Universitas Gadjah Mada dengan dua fakultas; fakultas hukum dan sastra dan filsafat, Sekolah Tinggi Islam Indonesia dengan empat jurusan yaitu teologi, pendidikan, hukum dan ekonomi, dan Sekolah Tinggi Tehnik dengan tiga jurusan yaitu sipil, elektro, dan kimia teknik, dan Akademi Politik dan Akademi Kepolisian di Yogyakarta. Ada juga Sekolah Tabib Tinggi, Institut Farmasi, dan Institut Pertanian di Klaten, dan Program Doktor Fakultas Kedokteran di Solo, Jawa Tengah. Apalagi ketika pemerintah Belanda memberikan kedaulatan kepada Indonesia setelah tahun 1950, beberapa lembaga dan akademi digabung menjadi satu lembaga seperti Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Farmasi, Institut Pertanian dan Akademi Politik digabung menjadi Universitas Gadjah Mada dan Akademi Kepolisian pindah ke Jakarta dengan nama baru Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1986: 163-164). Ada hal penting yang perlu digarisbawahi di era ini bahwa Sukarno membangun sekolah-sekolah umum di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia dan mengadakan perguruan tinggi di setiap provinsi di Indonesia (Thomas, 1973: 216; Cummings, 1981: 42). Terdapat sekitar 23 perguruan tinggi negeri, institut, dan IKIP baru yang menjadikan 26 provinsi di Indonesia Pada tahun 1960 memiliki perguruan tinggi (Nizam, 2006; 35).

Pemerintah Indonesia juga menetapkan bahwa 6 tahun anak Indonesia harus bersekolah di sekolah dasar (Setijadi, 1976: 45). Pada era ini umumnya terdapat 3 jenjang sekolah, yaitu Pendidikan Rendah 6 Tahun (SR) atau Pendidikan Rendah 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama 3 Tahun (SMP) atau Sekolah Menengah Pertama 3 Tahun, Sekolah Menengah Pertama 3 Tahun (SMA) atau Sekolah Menengah Atas 3 tahun dan Perguruan Tinggi (PT) atau Perguruan Tinggi serta adanya kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia untuk melanjutkan studi ke semua jenjang pendidikan seperti ketatnya persyaratan masuk sekolah yang didasarkan pada kelas dan kebangsaan tidak diterapkan seperti pada zaman penjajahan Belanda. Semua siswa dari berbagai keluarga berlatar belakang sosial seperti petani, pedagang kecil dan besar, pegawai negeri, tentara dan lain-lain mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah umum (Moestoko dkk, 1986: 150-151; Setijadi, 1976: 45). Pendidikan di era Soekarno melakukan upaya perubahan dari sistem pendidikan kolonial menjadi sistem nasional Indonesia. Transformasi ini membawa konsekuensi pada kurikulum untuk semua

jenjang pendidikan dari kepentingan pendidikan kolonial menjadi kebutuhan pendidikan nasional. Pada periode ini, pengembangan kurikulum harus mengacu pada; a) mengurangi pendidikan akademik, b) mata pelajaran harus dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, c) memperhatikan seni tradisional, d) pendidikan karakter, e) pendidikan jasmani, dan f) pendidikan kewarganegaraan dan sosial (Moestoko et al, 1986: 161). Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 menyebutkan tiga poin penekanan dalam mengembangkan pendidikan berdasarkan tiga jenjang pendidikan: a) kurikulum pendidikan dasar dirancang untuk mempersiapkan anak agar memiliki pengetahuan dasar, keterampilan, dan ketangkasan lahir dan batin serta mengembangkan dirinya. bakat dan hobi, b) kurikulum sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk tingkat pendidikan berikutnya dan untuk mengajar para ahli dengan beberapa keterampilan khusus berdasarkan bakat dan kebutuhan masyarakat, c) kurikulum pendidikan tinggi dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat yang dapat menjaga perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan masyarakat (1986: 161-162).

PENUTUP

Di dalam bab penutup ini, penulis akan menjelaskan beberapa catatan penting terkait dengan penelitian ini. Beberapa catatan itu antara lain terkait dengan perkembangan budaya akademik di era sebelum penjajahan, era penjajahan, dan era awal kemerdekaan.

- 1) Budaya akademik di era sebelum penjajahan diwarnai dengan karakteristik-karakteristik dan nilai-nilai keagamaan karena, waktu itu, perguruan tinggi yang ada adalah perguruan tinggi keagamaan, khususnya agama Buda. System dalam institusi pendidikan yang umumnya dilaksanakan di tempat-tempat ibadah berada dalam control pemimpin keagamaan.
- 2) Perkembangan budaya akademik di era penjajahan sangat memprihatinkan. Budaya akademik tidak berkembang sebagaimana perkembangan budaya akademik di negara-negara Eropa di mana perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya banyak penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru dari berbagai disiplin ilmu. Di negara-negara Eropa, khususnya di Belanda, waktu itu, kebebasan akademik dijamin dan menjadi inti dari pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di wilayah jajahan seperti di Nusantara termasuk di Jawa, pendidikan tinggi didirikan bukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan kajian-kajian, akan tetapi untuk memproduksi tenaga-tenaga pekerja profesional lulusan perguruan tinggi untuk bekerja pada pemerintah colonial. Kebebasan akademik tidak ada karena pemerintah Belanda (colonial) takut bahwa apabila ada kebebasan akademik, maka itu akan menyebabkan timbulnya kesadaran untuk melawan penjajah dan menuntut merdeka.
- 3) Di era kemerdekaan awal, perkembangan budaya akademik tidak begitu menggembirakan karena pemerintah kekurangan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya khususnya dana pengembangan pendidikan tinggi. Di era awal kemerdekaan, sikap anti penjajah Belanda telah menyebabkan para dosen yang berkewarganegaraan Belanda pulang menyebabkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia kekurangan dosen yang berpengalaman. Selain itu, minimnya anggaran dana untuk pengembangan pendidikan tinggi telah membuat pendidikan tinggi kekurangan fasilitas dan dana untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penelitian. Selain itu, kondisi politik di era pemerintahan Sukarno telah menarik kampus dan civitas akademika termasuk dosen

dan mahasiswa ke dalam pertarungan politik nasional. Perguruan tinggi kemudian lebih banyak menjadi tempat pertarungan politik praktis.

BIBLIOGRAFI

Boas, F. (1938). *The Mind Of Primitive Man*. New York: The Macmillan Company.

Cummings, W.K. (1981). *Pendidikan Tinggi Dan Masyarakat Indonesia*. Prisma. LP3ES. February, 1981.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Culture*. New York: Basic Books.

Nasution, S. (2014). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.

Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Djakarta: Gunung Agung.

Barnadib, S.I. (1983). *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tosh, John. (2015). *The Pursuit of History; Aims, Methods and New directions in the Study of History*, Routledge.

Lune, Howard and Berg, L. Bruce. (2017). *Quality Research Methods for the Social Sciences*. Person.

Glass, L. (1989). *Historical Research*. In P.J. Brink and M. J Wood (Eds). Sage.

Van Oord, L. (2015). *Culture As A Configuration Of Learning: Hypothesis In The Context Of International Education*. *Journal Of Research In International Education*, Vol. 4 (2), 173-191.